



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2026

TAHUN ANGGARAN : 2025

**DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA**



Jln. Bungur No. 3 Sumbawa Besar

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.S.E
Koordinator : Hj. SILVIANA, S.E
Penyusun : MOCHLIS DOMPASANOW, S.T
HENDRA IRAWAN, S.T
EVI ANDRIANI, S.STP
YUNI ILMU KURNIATI, S.STP., M.AP
SANAPIAH., SE., M.Ak
RIKZAN IMAL ISNAN, S.Ak
NURMANINGSIH, S.E

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN i

DAFTAR ISI..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.....2

 1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD25

 1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD25

 1.5 Isu Strategis27

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 30

 2.1 Visi dan Misi.....30

 2.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD31

 2.3 Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 41

 3.1 Akuntabilitas Kinerja.....41

 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....43

BAB IV KESIMPULAN..... 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen AKIP Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis DPMD Kab. Sumbawa yang diukur berdasarkan Indikator kinerja Utama dalam Renstra 2025-2029, secara khusus pengukuran kinerja dilakukan terhadap target kinerja tahun 2025 yang telah diperjanjikan dan merupakan penetapan kinerja tahun 2025. Selain itu LKjIP DPMD Kab. Sumbawa tahun 2025 ini juga ditujukan sebagai bahan koreksi untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, sehingga harapan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance dapat tercapai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMD Kabupaten Sumbawa ini merupakan refleksi dari pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis tahun 2025-2029 yang programnya mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa, sekaligus merupakan cermin kinerja dari seluruh aparat DPMD Kab. Sumbawa tahun 2025 dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yaitu "Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera", dan tentu saja dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat hal yang perlu disempurnakan, untuk itu masukan dan saran dari berbagai pihak kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya pada masa yang akan datang.

Akhirnya tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan LKjIP ini disertai agar laporan ini dapat lebih bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja DPMD Kab. Sumbawa.

Sumbawa Besar, 26 Maret 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,



RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kab. Sumbawa Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyusunan LKjIP ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta menindaklanjuti Surat Bupati Sumbawa Nomor : 008.8.6.3/020/I/ORG/2026 tanggal 13 Januari 2026, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026.

Salah satu asas dalam Penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas "Akuntabilitas". Melalui Azas Akuntabilitas, sebuah lembaga/ organisasi dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diemban sesuai dengan aspirasi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Teknis penyusunan laporan akuntabilitas diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas rencana kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sebagai penetapan kinerja Tahun 2025. Dari hasil olahan data dihasilkan bahwa Capaian Kinerja DPMD pada Kategori Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (ISS-PD-1) sebesar 88,97%, Kategori AKIP Perangkat Daerah (ISS-PD-2) sebesar 100%, Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (ISS-PD-3) Sebesar 100%, Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (ISS-PD-4) sebesar 100%, Indeks Desa (ISS-PD-5) sebesar 100%, dan Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (ISS-PD-6) sebesar 86,65% atau dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran pada (ISS-PD-1) dan (ISS-PD-6) berkisar antara 76 - ≤90 atau berada dalam interval dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "tinggi" karena pencapaian atau

realisasi capaian kinerja telah terpenuhi dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan Capaian Kinerja DPMD pada (ISS-PD-2), (ISS-PD-3), (ISS-PD-4), dan (ISS-PD-5) berkisar antara 91 - ≤100 atau berada dalam interval dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat tinggi" karena pencapaian atau realisasi capaian kinerja telah terpenuhi dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good government Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perjelasan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyatakan bahwa pimpinan masing-masing perangkat daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja dimaksud adalah laporan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan Pernyataan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa yang diamanatkan untuk melaksanakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dituntut untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good government Governance), dan dituangkan dalam sebuah Dokumen Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Selain itu juga mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, serta Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

Laporan Kinerja memuat laporan hasil capaian kinerja sasaran strategis yang indikator dan targetnya telah dituangkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada Bupati/Wakil Bupati Sumbawa serta semua Stakeholder pembangunan yang terkait dengan pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan juga sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

Untuk memastikan keseluruhan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten sumbawa dapat terlaksana sesuai dengan target waktu, Kuantitas dan kualitas sasaran, maka dibuatlah perjanjian antara kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sumbawa, yang selanjutnya diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat individu pegawai yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Output dari Setiap penyelenggara negara dan pemerintah mampu menampilkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan, serta setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

1.2.1. Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan susunan organisasi pada tahun 2022 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Manifestasinya adalah paket regulasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa meliputi:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang

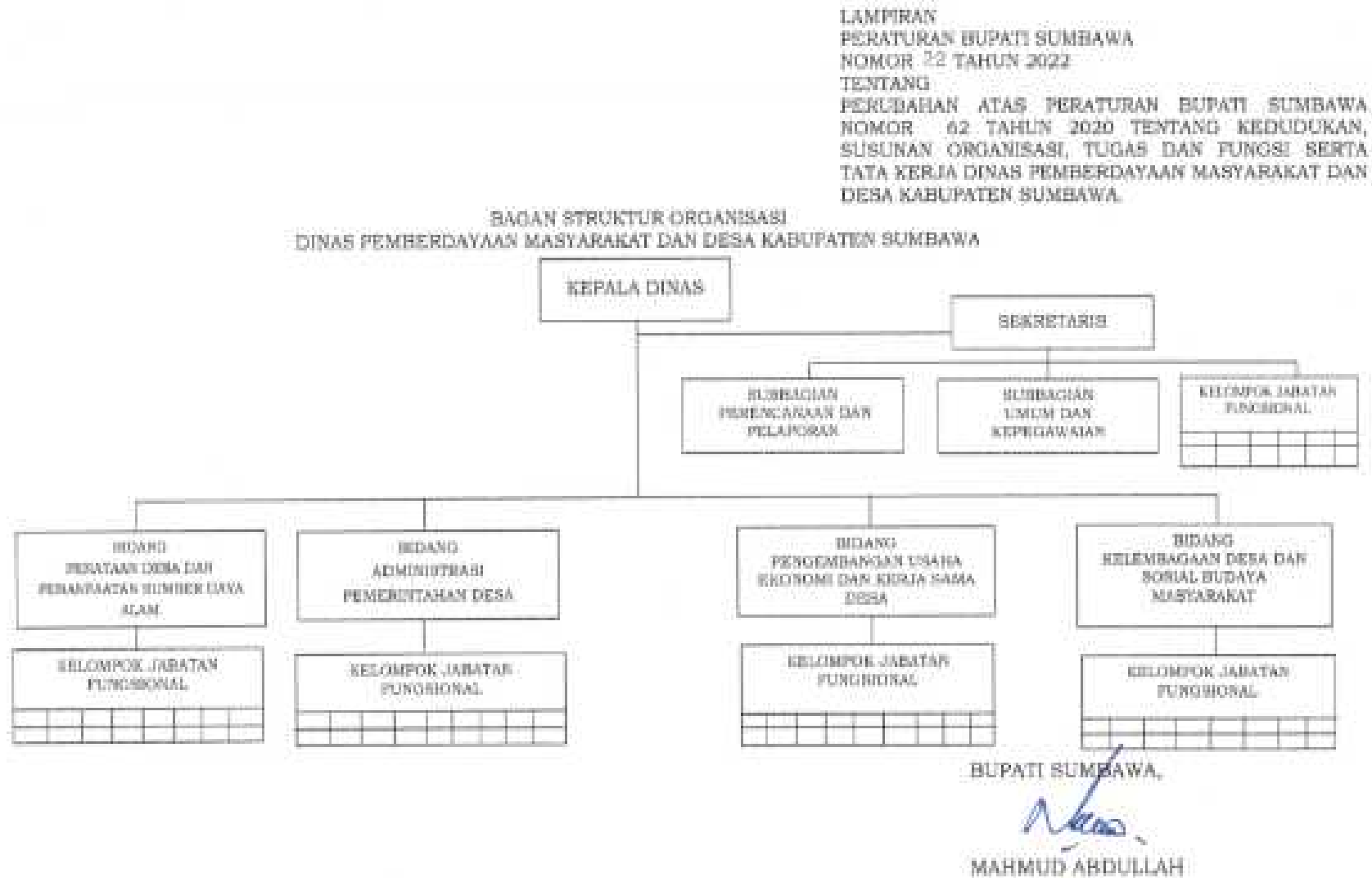
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 26 November 2024

- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, tanggal 16 Februari 2022.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 3. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 4. Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
- d. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa terjabarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa



1.2.3. Tugas dan Fungsi

Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, tanggal 16 Februari 2022 adalah sebagai berikut;

Kepala Dinas

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penataan Desa, administrasi Pemerintahan

- Desa, pengembangan usaha ekonomi dan kerja sama Desa dan kelembagaan Desa dan sosial budaya masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;

- g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;

- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- j. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kerja Dinas;
- k. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;
- l. menyusun Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;

- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- (1) Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan desa, dan pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penataan Desa;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan Desa;
- e. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa;
- g. melaksanakan fasilitasi tata wilayah Desa, penamaan dan kode desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa termasuk pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah batas desa antar kecamatan dan pengembangan bahan perumusan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- j. melaksanakan penataan kewenangan desa;
- k. melaksanakan pelaksanaan penugasan urusan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- l. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- m. melaksanakan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;
- n. melaksanakan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;

- o. mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir pedesaan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;

- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan desa;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan Profil Desa termasuk Kelurahan termasuk menyiapkan bahan dan basis data penyusunan data potensi dan profil desa;
- h. melaksanakan fasilitasi manajemen pemerintahan desa dan pengembangan inovasi desa;
- i. melaksanakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa termasuk pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- k. menyelenggarakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi/penatausahaan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan penyusunan produk hukum desa;
- m. melaksanakan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- n. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- o. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- p. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- q. melaksanakan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (LKPJ Kepala Desa dan LPPDes);
- r. melaksanakan fasilitasi peran Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa;
- s. melaksanakan administrasi pembinaan pemerintahan dan desa pengawasan penyelenggaraan serta penyusunan pelaporan penatausahaan keuangan dan aset desa;

- t. melaksanakan perencanaan perencanaan pembinaan, pembangunan pembangunan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan desa sesuai dengan tahapan-tahapan desa dan pelaksanaan tata pemerintahan desa dan kegiatan tata pemerintahan desa;
- u. melaksanakan pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- v. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan desa;
- w. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa serta pelaksanaan pendistribusian keuangan desa;
- x. melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi dan kerja sama desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama Desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja

sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa termasuk pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap hasil usaha ekonomi masyarakat dan/atau usaha ekonomi desa menjadi produk unggulan Desa (PRUDES);
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bersama stakeholder lainnya guna pengembangan pemasaran produk hasil usaha ekonomi masyarakat dan usaha ekonomi Desa melalui pemenuhan standarisasi produk unggulan desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak ketiga;
- g. menyiapkan bahan konsep kebijakan pengaturan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja sama Antar Desa serta penyiapan bahan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama serta kebijakan teknis Kerja Sama Desa;
- h. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa serta pelaksanaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa yang merupakan lembaga legitimasi yang mewadahi lembaga ekonomi kerja sama antar Desa misalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- i. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Sistem Informasi Desa;
- j. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam Daerah dan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga serta fasilitasi identifikasi potensi dan rencana pelaksanaan kerja sama desa serta melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, kerja sama antar desa antar kecamatan dalam Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten Sumbawa dengan Desa Kabupaten lainnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani urusan pemerintahan subbidang kerja sama Daerah;
- l. melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan dan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengembangan penemu teknologi tepat guna dan pemasaran hasil usaha temuan teknologi tepat guna;
- m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok dan/atau penemu teknologi tepat guna dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak ketiga;
- n. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan program dana amanah pemberdayaan masyarakat melalui pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan unit pengelola kegiatan di Kecamatan dan lembaga kerja sama antar desa (Badan Kerja sama Antar Desa) pelaksana program dana amanah pemberdayaan masyarakat serta Program Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan BUMDESMA KAWASAN di Kawasan Perdesaan Kecamatan dan Lembaga Kerja sama Antar Desa (Badan Kerja sama Antar Desa) lembaga legitimasi yang mewadahi BUMDESMA pada Kawasan Perdesaan pelaksana Program Pembangunan Kawasan perdesaan;
- o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan dan sinergitas program bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan;

- p. menyelenggarakan pendataan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan pendataan lembaga ekonomi antar Desa seperti Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- q. melaksanakan koordinasi, fasilitasi upaya peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) melalui dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta Pihak Ketiga;
- r. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa;
- s. menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelola lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) serta peningkatan kapasitas pendampingan desa;
- t. melaksanakan pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama);
- u. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pasar desa dan pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna;
- v. melaksanakan identifikasi kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan;
- w. melaksanakan sosialisasi kegiatan dan promosi hasil temuan teknologi tepat guna;
- x. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan, kerja sama dan bantuan teknologi tepat guna;
- y. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan pos pelayanan teknologi tepat guna desa dan warung teknologi tepat guna desa;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama Desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat

Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat

- (1) Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan desa dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
 - pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat adalah sebagai berikut:

- merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
- melaksanakan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- melaksanakan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat;

- g. menyiapkan bahan dan basis data lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengurusan dan administrasi serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat, pembentukan dan revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa Model;
- k. melaksanakan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- l. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat;
- m. mengembangkan pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong;
- n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- o. melaksanakan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan dasar desa di bidang pendidikan dan kesehatan;
- q. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial budaya masyarakat;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

- 3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I.2.2. Sumber Daya Aparatur

a. Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis. Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, jumlah Pejabat eselon II, III, IV dan hasil dari penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pejabat Eselon II, III, IV dan Jabatan Fungsional Berdasarkan Struktur Organisasi (2025)

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional yang di Setarakan
1	2	3	4	5	5
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretariat		1	2	-
3	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam		1	-	
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		1	-	1
5	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa		1	-	1
6	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat		1	-	-
	Jumlah	1	5	2	2

Berdasarkan data terkini (Tahun 2025), jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebanyak 35 Orang dengan penjabaran 28 orang PNS, 3 Orang CPNS, 3 orang PPPK dan 1 Orang PPPK Paruh Waktu, 2 Orang Non PNS, sebagaimana terjabarkan dalam tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum / Staf (2025)

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jab. Fung	fung umum / staf	PPPK	PPPK PW	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Dinas	1								1
2	Sekretariat		1	2	0	8	1	0	2	14
2.1.	Sekretaris Dinas		1							1
2.2.	Subbag Perencanaan dan Pelaporan			1		2				3
2.3.	Subbag Umum dan Kepegawaian			1	0	3	0		2	6
2.4.	Subbag Keuangan			0		3				3
2.5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah				0		0			0
2.5.	Perencana				0		1			1
3	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam		1			3				4
3.1.	Analisis Kebijakan				0		0			0
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		1			5	1	1	0	8
4.1.	Analisis Kebijakan				1					1
5	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa		1			3				4
5.1.	Analisis Kebijakan				1					1
6	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat		1			2	1			4
6.1.	Analisis Kebijakan									0
7.	Pejabat Fungsional				0		0			0
TOTAL		1	5	2	2	21	3	1	2	37

Membandingkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, terdapat beberapa kekurangan pada fungsional umum/Staf. Kondisi kepegawaian (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 1.3 berikut;

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan (2025)

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	D3	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kepala Dinas	-	1						1
2	Sekretariat	-	1	7	2	2			12
3	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-		2		2			4
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	-	1	5		3			9
5	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	-		5		0			5
6	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	-	1	2		1			4
	Jumlah	0	4	21	2	8	0	0	35
	Persentase (%)	0,00	11,43	60,00	5,71	22,86	0,00	0,00	100

Kapasitas dan kapabilitas Pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.3, tingkat pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 21 orang (60,00) dengan rincian 15 orang PNS 3 Orang CPNS dan 3 Orang PPPK. Tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang relatif tinggi ini seharusnya merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya pegawai yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 4 orang (11,43), pendidikan Sarjana Muda / Diploma III sebanyak 2 orang (5,71), serta pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 8 orang (22,86). Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi issu strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa adalah mengenai fungsional perencana/staf perencana yang masih dibutuhkan disebabkan instensitas pekerjaan yang semakin meningkat akibat perubahan regulasi, selain itu Subbagian Umum dan kepegawaian juga masih membutuhkan penambahan ASN di fungsional umum/staf pranata komputer, Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang statusnya belum terisi, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) belum tersedia karena diatur oleh Peraturan Kementerian Desa PDT mengani PSM tersebut juga menjadi masalah yang perlu dicari

jalan keluarnya/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) dan Badan Kepegawaian Daerah, Selanjutnya dijabarkan kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) yang telah diikuti disajikan pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Prajabatan dan Diklat
Kepemimpinan (2024)

No	Uraian	Jenjang Diklatpim Yang Telah Diikuti			
		Prajabatan	PIM IV	PIM III	PIM II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Dinas	1	1	1	-
2	Sekretariat	12	-	-	-
3	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	4	-	-	-
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	8	-	-	-
5	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	5	-	-	-
6	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	4	-	-	-
Jumlah Yang Telah Mengikuti		31	1	1	0
Jumlah Seharusnya		31	7	5	1
Jumlah Yang Belum Mengikuti Diklat		0	6	4	1

Tabel 1.4 menggambarkan bahwa dari semua ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah menempuh pendidikan dan latihan Prajabatan sebanyak 31 orang sedangkan 4 (empat) orang belum prajabatan dengan status 3 (tiga) orang sebagai PPPK dan 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu. Sementara dari 2 pejabat yang menduduki jabatan Eselon IV sekarang belum ada yang telah menempuh Diklatpim IV, termasuk eselon IIIb yang seharusnya sudah mengikuti diklatpim IV, kecuali Kepala Dinas, Demikian pula dengan 5 (lima) pejabat pada Eselon III, tidak/ belum ada pejabat yang telah menempuh Diklatpim III, kecuali Kepala Dinas PMD, Begitu juga dengan pejabat pada Eselon II tidak atau belum mengikuti Diklatpim II. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumberdaya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa masih terdapat pejabat eselon yang perlu diberikan kesempatan untuk menempuh jenjang Diklatpim yang sesuai dengan jenjang jabatan eselon yang didudukinya.

b. Aset, Sarana dan Prasarana

Asset berupa sarana prasarana merupakan unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan target kinerja yang telah direncanakan. Adapun kondisi/keadaan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Per 31 Desember 2025 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Daftar Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumbawa
Thn 2025

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	ALAMAT BARANG	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	SEDANG	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7
A.	KENDARAAN					
1	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	DPMD	13	9	4	~
2	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	DPMD	3	1	1	1
B.	TANAH / BANGUNAN					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Bungur No. 3 Sumbawa Besar	1	1	~	~
2	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Bungur No. 3 Sumbawa Besar	1	1	~	~
3	Bangunan Taman	Jl. Bungur No. 3 Sumbawa Besar	1	1	~	~
C.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
1	Instalasi Air Bersih Lain-lain	DPMD	1	1	~	~
2	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	DPMD	1	1	~	~
D.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR					
1	Global Positioning System (GPS)	DPMD	1	1	~	~
2	Mesin Hitung Manual	DPMD	1	1	~	~
3	Rak Besi/Metal	DPMD	4	1	2	1
4	Filling Besi/Metal/Kayu	DPMD	3	2	~	1
5	Brand Kas	DPMD	1	~	~	1
6	Lemari Kaca	DPMD	3	3	~	~
7	Papan Visuil	DPMD	2	2	~	~
8	Papan Pengumuman	DPMD	1	1	~	~
9	Mesin Absensi	DPMD	1	1	~	~
10	Mesin Pompa Air	DPMD	1	1	~	~
11	Meja Rapat	DPMD	2	2	~	~
12	Kursi Tamu	DPMD	2	~	2	~
13	Kursi Putar	DPMD	4	~	4	~
14	Kursi Lipat	DPMD	2	2	~	~
15	Meja Komputer	DPMD	1	1	~	~
16	Daun Pintu Alumunium	DPMD	1	1	~	~
17	Kursi Kerja	DPMD	12	~	12	~
18	Taplak Meja	DPMD	4	4	~	~
19	AC Unit	DPMD	1	1	~	~
20	AC Split	DPMD	2	2	~	~
21	Kipas Angin	DPMD	3	3	~	~
22	Wireless	DPMD	1	1	~	~
23	Microphone Table Stand	DPMD	1	1	~	~
24	Tangga Alumunium	DPMD	1	1	~	~
25	Mimbar/Podium	DPMD	1	1	~	~
26	P.C Unit/ Komputer PC	DPMD	12	10	1	1
27	Lap Top	DPMD	17	13	3	1
28	Note Book	DPMD	7	7	~	~
29	Personal Komputer Lain-lain	DPMD	3	3	~	~
30	Hard Disk/Hard Disk Eksternal	DPMD	2	2	~	~
31	Printer	DPMD	20	20	~	~
32	Monitor	DPMD	1	1	~	~
33	UPS	DPMD	4	4	~	~
34	Stabilizer/Stavolt	DPMD	1	1	~	~

NO	JENIS BARANG /NAMA BARANG	ALAMAT BARANG	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	SEDANG	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	DPMD	1	1	~	~
36	Meja Kerja	DPMD	14	1	13	~
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	DPMD	3	1	2	~
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	DPMD	1	1	~	~
39	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	DPMD	1	1	~	~
40	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	DPMD	1	1	~	~
41	Lemari Buku untuk Perpustakaan	DPMD	1	1	~	~
42	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	DPMD	12	6	6	~
43	Camera + Attachment	DPMD	5	5	~	~
44	Layar Proyektor	DPMD	1	1	~	~
45	Baterai Laptop	DPMD	1	1	~	~
46	Lemari Kayu	DPMD	7	7	~	~
47	Filling Kayu	DPMD	1	1	~	~
48	Alat Rumah Tangga lain-lain	DPMD	1	1	~	~
49	Electric Generating Set lain-lain	DPMD	4	4	~	~
50	Alat Kantor lain-lain	DPMD	311	311	~	~

c. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, Tabel berikut memperlihatkan jumlah alokasi anggaran yang berupa Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung atau Belanja Operasi, Belanja Pegawai, juga Belanja Modal dari Tahun 2017-2024 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 1.6
Alokasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2025

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	2017	7.038.143.327	6.779.932.003	96,33
2	2018	6.464.920.724	6.385.882.092	98,78
3	2019	5.940.436.008	5.801.931.091	97,67
4	2020	6.144.529.298	5.588.474.535	90,95
5	2021	7.189.255.765	7.092.256.962	98,65
6	2022	7.167.618.433	7.046.591.105	98,31
7	2023	7.614.413.622	7.383.778.430	96,97
8	2024	8.333.510.812	8.017.480.027	96,21

Sumber : DPA/DPPA - DPMD, Beberapa Tahun, diolah.

Tabel 1.7
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis pada DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2020

No	Tahun Anggaran	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	2017	3.185.977.902	217.190.000	3.521.636.425	113.339.000
2	2018	3.695.404.009	158.740.000	2.562.796.715	47.980.000
3	2019	3.590.334.983	121.150.000	2.194.664.025	34.287.000
4	2020	3.625.032.734	89.500.000	2.387.105.064	42.891.500

Tabel 1.8
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis pada DPMD Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Hibah (Rp)	Belanja Modal (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	2021	5.779.159.083	1.378.908.182	-	31.188.500
2	2022	3.818.203.485	3.329.414.948	20.000.000	-
3	2023	3.395.589.634	3.787.787.998	-	422.860.634
4	2024	3.449.114.088	4.583.124.524		301.272.200
5	2025	3.631.113.239	4.383.974.968		157.497.400

Sumber : DPA/DPPA - DPMD, Beberapa Tahun, diolah.

1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawasebagai suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahPenyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun

Selaku kepala perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun (SK terlampir) yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Setelah tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terbentuk, maka tim dimaksud selanjutnya melakukan pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap bidang. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

3. Pengukuran Kinerja

Tahap berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan perangkuman data kinerja, tim selanjutnya melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim adalah dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dapat ditentukan secara berkala (triwulan) dan terakumulasi menjadi pengukuran tahunan. Pengukuran dan perbandingan dalam laporan kinerja tersebut dilakukan oleh tim untuk mendapatkan kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025.

4. Penyusunan dan Penyampaian LKjIP

Setelah tahap pengukuran kinerja selesai dilaksanakan, maka tim selanjutnya menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 kepada seluruh kepala bidang untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang. Setelah seluruh Kepala Bidang menyetujui rancangan atau draft LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tersebut maka diteruskan penyampaiannya kepada Kepala Dinas selaku Pimpinan Perangkat Daerah.

5. Reviu atas LKjIP

Setelah Kepala Dinas menerima hasil kerja Tim Penyusun, berupa draft LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 maka selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku APIP untuk dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa melalui Tim Penyusun LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut.

Tahapan reviu tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

6. Penyampaian LKjIP

Kepala Dinas selaku Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima dan disetujui oleh Bupati Sumbawa, maka selanjutnya dokumen LKjIP di unggah pada aplikasi e-SAKIP REVIU Kementerian PAN-RB.

1.5 Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumbawa
Permasalahan Urusan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum maksimalnya kesadaran ASN untuk mengembangkan Karir dan Profesinya dalam peningkatan kinerja	1 Kurangnya pemahaman ASN tentang pentingnya profesionalitas ASN dalam bekerja	1 Kurangnya Pemahaman beberapa ASN melakukan pengisian riwayat pelatihan secara berkala
			2 Beberapa ASN belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya pengembangan diri dalam peningkatan kinerja.
			3 Dimensi kompetensi menjadi kendala Beberapa ASN pengembangan diri
2	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat	2 Rendahnya Kualitas Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat	1 Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan
			2 Masih rendahnya kompetensi SDM dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih	3 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip Birokrasi Unggul	1 Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology)
			2 Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparaturnya dalam tata kelola pemerintahan
			3 Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	(anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien			4	Masih rendahnya kompetensi SDM dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
4	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih rendah	4	Belum Optimalnya Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	1	Masih rendahnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan
				2	Masih rendahnya kompetensi SDM Pemerintah Desa dalam rangka Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
5	Tingkat kemandirian desa di Kabupaten Sumbawa masih rendah	1	Rendahnya Nilai Indeks Desa di Kabupaten Sumbawa	1	Rendahnya nilai indeks layanan dasar di Kabupaten Sumbawa
				2	Rendahnya nilai indeks sosial di Kabupaten Sumbawa
				3	Rendahnya nilai indeks ekonomi di Kabupaten Sumbawa
				4	Rendahnya nilai indeks lingkungan di Kabupaten Sumbawa
				5	Rendahnya nilai indeks aksesibilitas di Kabupaten Sumbawa
				6	Rendahnya nilai indeks tata kelola pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa
6	Belum optimalnya Kapasitas Fiskal Desa	1	Masih rendahnya Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	1	Masih rendahnya pembinaan kelembagaan desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa
				2	Masih rendahnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Sumber : Perbup Sumbawa No. 92 Tahun 2025 tentang Renstra DPMD 2025-2029

Uraian masalah pokok pada Tabel 1.9 di atas merupakan Perumusan Masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu yang berisi tujuan, sasaran, dan startegi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan proqram perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 92 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”. yang dilaksanakan melalui Misi Kedua, Ketiga dan Kelima yaitu

Misi 2 Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, berdedikasi, berkinerja tinggi dan bersih dari KKN, serta penegakan hukum.

Misi 3 Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, serta pengembangan infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Misi 5 Masyarakat Sejahtera melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin (penanggulangan kemiskinan), memperkuat ketahanan pangan Masyarakat, memaksimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mengurangi pengangguran dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Penjabaran Visi dan Misi Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa berikut dijabarkan Matriks hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran 2025-2029

Tabel. 2.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPMD 2025-2029

visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera	Misi 2 : Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa
	Misi 3 : Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
	Misi 5 : Masyarakat Sejahtera		Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa

Sumber : Perbup Sumbawa No. 92 Tahun 2025 tentang tentang Renstra DPMD 2025-2029

2.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD

Berdasarkan rumusan Visi, Misi dan mengacu serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029 serta maka tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD

Berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Periode Jangka menengah (5 Tahun) sbb:

Tabel. 2.2 Matriks Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas PMD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)
	Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) (Poin)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)
	Indeks Infrastruktur Daerah (poin)	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)
	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Miliar Per Tahun)

Sumber : Perbup Sumbawa No. 92 Tahun 2025 tentang tentang Renstra DPMD 2025-2029

Tabel 2.3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa 2025-2029

Tujuan		Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Strategi	Program	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Peningkatan Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) (Poin)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	Peningkatan kerjasama desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	

Tujuan		Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Strategi	Program	
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan kualitas administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
	Indeks Infrastruktur Daerah (poin)	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Peningkatan cakupan fasilitasi penataan Desa	Program Penataan Desa	
	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Peningkatan Pendapatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	

Sumber : Perbup Sumbawa No. 92 Tahun 2025 tentang tentang Renstra DPMD 2025-2029

Tabel 2.4.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan DPMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	A	A	A	A	A
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) (Poin)	4,42	4,44	4,45	4,46	4,48
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Pelayanan Publik (poin)	3,19	3,25	3,32	3,38	3,45
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Infrastruktur Daerah (poin)	89,78	91,76	93,27	94,73	96,27
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	14.971,05	14.981,05	14.991,05	15.001,05	15.011,05
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.614	10.936	11.258	11.580	11.902
		Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	133.106.651	149.984.575	169.002.619	190.432.151	214.578.948

Sumber : Perbup Sumbawa No. 92 Tahun 2025 tentang Renstra DPMD 2025-2029

2.2.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mencermati harapan ke depan dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maka diidentifikasi beberapa permasalahan serta penyebab masalah baik dari aspek internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Tabel 2.5. Penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PMD Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Peningkatan Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian DPMD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPMD
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan DPMD
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMD
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum DPMD
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DPMD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan kerjasama desa	Melaksanakan fasilitasi Kerjasama antar Desa berdasarkan data yang valid
		Peningkatan kualitas tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas SDM dalam Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa		Meningkatkan kualitas SDM dalam Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Peningkatan cakupan fasilitasi penataan Desa	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Penataan Desa sesuai dengan NSPK
	Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Peningkatan Pendapatan Desa	Meningkatkan ketersediaan data dan sarpras dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Sumber : Perbup Sumbawa No. 92 Tahun 2025 tentang tentang Renstra DPMD 2025-2029

Adapun program untuk menunjang Strategi dan Kebijakan pada Dinas PMD Kab. Sumbawa Tahun 2025 adalah sbb :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.3 Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka DPMD Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Penyusunan Rencana Strategis 2025 – 2029, yang selanjutnya Indikator Kinerja Utama

(IKU) tersebut menjadi isi dan bagian dari Perjanjian Kinerja yang harus dicapai dalam Tahun Anggaran bersangkutan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka target penting yang diperjanjikan tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 (terlampir). Target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 sama dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 (terlampir), namun demikian indikator kinerja merupakan kegiatan untuk mengukur capaian indikator kinerja utama. Penyesuaian indikator kinerja dimaksud dilakukan tanpa merubah Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, akan tetapi penyesuaiannya dilakukan pada proses pengukuran akuntabilitas kinerja (Lampiran 4. Matriks Hasil Pengukuran Kinerja). Berikut ringkasan target kinerja yang disesuaikan pada proses pengukuran akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA DPMD TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	45.508.000,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.131.906.139,00
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	100	Program Peningkatan Kerjasama Desa	7.371.750,00
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.862.674.018,00
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Baik	Program Administrasi Pemerintahan Desa	0
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	14.971,05	Program Penataan Desa	26.318.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	133.106.651	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	98.807.700,00

Sumber : Perbup Sumbawa No. 92 Tahun 2025 tentang tentang Renstra DPMD 2025-2029

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

3.1.1. Formulasi Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data Realisasi dan Target, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize dan minimize.

Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja adalah sebagaimana penjelasan berikut :

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi Maximize

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi Minimize:

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

- 3) Nilai Kinerja

Perhitungan Nilai Kinerja untuk mendapatkan NKO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat
Perhitungan nilai kinerja agregat dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai mean Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5.	≤50	Sangat Rendah	

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target dan dijasikan dalam bentuk persentase (%) pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, bahwa terdapat 6 sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu: 1). Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah, 2). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, 3). Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 4). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa, 5). Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa, 6). Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa dan Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat

realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus polarisasi Maximize sebagai berikut:

$$\text{Capaian Pertahun} : = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 6 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama serta capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja IKU DPMD Kabupaten Sumbawa
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	Sedang	Rendah	88,97
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	Kategori	A	A	100,10
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	%	100	22,29	22,29
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Kategori	Baik	Baik	100,00
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Poin	14.971,05	14.971,05	100,00
6	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rp.	133.106.651	115.340.213	86,65
		Rata-Rata				83,00
		Tertinggi				100,10
		Terendah				22,29

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, menetapkan 6 (enam) indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berikut disajikan cascading atas sasaran dan indikator sasaran sebagai PK. Pada masing-masing indikator sasaran strategis perangkat daerah (ISS-PD), akan di disajikan nilai atau jumlah target, realisasi dan capaiannya, kendala atau hambatan, serta dukungan dan upaya dilakukan terhadap tingkat ketercapaian setiap indikator sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 di jabarkan sebagai berikut:

Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD), pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis daerah yang menjadi IKD, akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
 - b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
 - c. Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
 - d. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
 - e. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
 - f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
 - h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- sebagai berikut:

a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (IP ASN PD) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada suatu perangkat daerah yang dihitung berdasarkan komponen utama meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai. Indeks ini disusun sebagai instrumen evaluasi yang objektif dan terstandar untuk menggambarkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Pengukuran IP ASN PD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Nilai IP ASN Tahun n

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yang menetapkan metodologi, indikator, dan pembobotan dalam penilaian sehingga hasil indeks dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembinaan ASN di perangkat daerah.	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai AKIP PD tahun n-1 Publikasi Inspektorat Tahun n
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu adalah persentase jumlah desa yang menyerahkan laporan realisasi anggaran kepada Bupati paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dibandingkan dengan total seluruh desa di wilayah tersebut.	Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan realisasi APBDesa sesuai batas waktu ketentuan terhadap total seluruh desa di wilayah tersebut.
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah indeks nilai rata-rata atas persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diukur melalui sembilan unsur pelayanan sesuai standar regulasi yang berlaku (Permenpan RB No. 14 Tahun 2017).	Total Nilai SKM Tahun n

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Peremdes PDTT) Nomor 09 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, menyebutkan bahwa Indeks Desa (ID) adalah Indeks Desa yang dibentuk dari 6 (enam) Komponen Dimensi yaitu Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. indeks desa merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Indeks Desa dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, dengan tujuan adalah : menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan menyediakan data dan informasi dasar bagi Pembangunan Desa.	Total Nilai IDM Tahun n-1
6	Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa adalah nilai rata-rata alokasi dana dari pendapatan pajak dan retribusi kabupaten/kota yang disalurkan kepada seluruh desa di wilayah tersebut, yang pengalokasiannya diatur secara spesifik berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20i4 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang masih berlaku sebagai aturan pelaksana sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Peruhan dari PP nomor 47 Tahun 2015.	Hasil bagi antara total realisasi penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dengan jumlah seluruh desa penerima di wilayah tersebut

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Kriteria Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja IKD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, disusun sesuai PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis daerah dan kriteria ketercapaian Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Kriteria Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	Sedang	Rendah	88,97	Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Kategori AKIP PD (Kategori)	Kategori	A	A	100,10	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	Daerah						
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	%	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Kategori	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Poin	14.971,05	14.971,05	100,00	Sangat Tinggi
6	Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rp.	133.106.651	115.340.213	86,65	Tinggi
		Rata-Rata				83,00	
		Tertinggi				100,10	
		Terendah				22,29	

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun N-1	Capaian Tahun N	Naik (+) / Turun (-)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	99,70	88,97	-10,73
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	Kategori	97,75	100,10	2,35
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	%	50,96	100	49,04
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Kategori	98,61	100,00	1,39
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Poin	98,17	100,48	2,31
6	Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rp.	100,00	86,65	-13,35

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Tahun Akhir (2030)	Realisasi Tahun N (2025)	Keterangan	
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	Sedang	Rendah	-13,00	Belum Tercapai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	Kategori	A	A	-0,10	Belum Tercapai
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	%	100	100	0	Tercapai
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Kategori	Baik	Baik	-5,00	Belum Tercapai
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Poin	15.021,05	14.971,05	-50,00	Belum Tercapai
6	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rp.	241.787.558,26	115.340.213	- 126.447.345,22	Belum Tercapai

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Tahun n (2025)	Realisasi Provinsi NTB Tahun n (2025)	Realisasi Nasional Tahun n (2025)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	Rendah	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	Kategori	A	A	-
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	%	22,29	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Kategori	Baik	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Tahun n (2025)	Realisasi Provinsi NTB Tahun n (2025)	Realisasi Nasional Tahun n (2025)
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Poin	14.971,05	-	-
6	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rp.	115.340.213	-	-

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	(88,97) Kriteria Tinggi	1 Masih ada ASN yang belum melengkapi Dokumen Manajemen Sistem pada aplikasi My ASN 2 Banyak ASN yang tidak mengikuti peningkatan kapasitas (Diklat) baik yang dilaksanakan secara kedinasan maupun dilaksanakan secara mandiri 3 Masih ada ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi pada aplikasi My ASN berdasarkan hasil SKP 4 Masih ada ASN yang tidak taat pada jam Kerja sesuai hasil Presensi Digital pada My ASN 5	1 Menghimbau ASN untuk melengkapi Dokumen Manajemen Sistem pada aplikasi My ASN 2 Menghimbau ASN untuk Diklat baik secara kedinasan maupun secara mandiri 3 Menghimbau ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi untuk meningkatkan nilai SKPnya 4 Menghimbau ASN untuk memperbarui data pada My ASN 5 Menghimbau ASN untuk mentaati jam Kerja yang tergambar pada My ASN
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	(100,10) Kriteria Sangat Memuaskan	1 Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Sumbawa Tahun 2025 atas kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,12 point atau meningkat sebesar 1,01 %. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja melalui empat langkah strategis, yaitu melegalkan dokumen Rencana Kerja (Renja) melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai regulasi yang berlaku, mengintegrasikan pengumpulan serta pengukuran data kinerja menggunakan aplikasi monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis teknologi informasi, menyusun laporan kinerja secara berkala setiap triwulan dengan mencantumkan progres serta capaian persentase yang jelas, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP baik tahun berjalan maupun tahun sebelumnya demi penyempurnaan kinerja yang berkelanjutan.	1 Solusi komprehensif dapat dilakukan dengan membuat legalitas Renja melalui Peraturan Kepala Daerah, mengotomasi sistem pengukuran kinerja lewat aplikasi digital/Media Sosial/Website resmi yang dimiliki oleh DPMD, serta menerapkan tradisi pelaporan triwulanan yang ketat guna memastikan keberkelanjutan kinerja yang terukur.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	(100) Kriteria Sangat Tinggi	2 penetapan APBDes tepat waktu masih terkendala karena pemahaman yang terbangun pada pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan sebagai tim evaluasi APBDes cenderung masih menunggu diterbitkannya data pagu indikatif dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Kabupaten. jika merujuk pada ketentuan perencanaan Desa berdasarkan permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa dan permendagri 20 Tahun 2018 bahwa proses penyusunan rancangan perdes APBDes sudah dimulai setelah ditetapkannya Perdes RKP Desa paling lambat per 31 September dan awal oktober adalah fase penyusunan Rancangan Perdes APBDes dan ditetapkan paling lambat sampai dengan akhir Desember.	2 Pembinaan berkala terhadap pelaksanaan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dan Permendagri 20 Tahun 2018 terhadap Pemerintah Desa dan TIM Evaluasi APBDes
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	(100) Kriteria Sangat Tinggi	Terealisasi sebesar 100%, Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas ini tetap dilakukan survey IKM, tetapi berbanding terbalik dengan kondisi anggaran yang tidak ada (tidak teranggarkan) pada level sub kegiatan dan Indikator Kegiatan	Diharapkan kepada TAPD supaya dilevel IKU dapat teranggarkan dan mendapatkan perhatian khusus agar terpenuhi kinerja diiringi oleh dukungan anggaran pada level Subkegiatan, Kegiatan dan Program.
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	(100) Kriteria Sangat Tinggi	Pendataan Indeks Desa 2025 memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi status perkembangan desa dengan mengukur tingkat kemandirian berdasarkan indikator pembangunan. Selain itu, pendataan ini menyediakan basis data yang akurat guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah pendataan Indeks Desa 2025 berfokus pada pembangunan desa berkelanjutan melalui analisis perkembangan desa berdasarkan Dimensi Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Hasil Olahan Data Indeks Desa disimpulkan Bahwa Total Nilai Indeks Desa Tahun 2025 sebesar 14.971,05 atau sama dengan yang ditargetkan dengan tingkat capaian 100%.	Pendataan Indeks Desa membutuhkan Sarana dan Prasarana Pendukung serta membutuhkan anggaran oleh sebab itu karena indeks desa merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas PMD yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Renstra 2025-2029 DPMD maka di Butuhkan Dukungan Sarana, Prasarana dan Anggaran Tersendiri.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
6	Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	(85,65) Kriteria Tinggi	Permasalahan tidak tercapainya rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa disebabkan oleh perbedaan antara proyeksi pendapatan daerah dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi selama tahun anggaran berjalan. Ketika realisasi pendapatan daerah lebih rendah dari target, alokasi dana bagi hasil kepada desa menjadi berkurang akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, penurunan aktivitas ekonomi, serta keterlambatan pemungutan dan penyetoran retribusi.	Solusinya adalah dengan meningkatkan akurasi perencanaan target pendapatan melalui evaluasi realisasi tahun sebelumnya, memperkuat pendataan objek pajak dan retribusi, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses pemungutan agar lebih optimal. Pemerintah daerah juga perlu melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah desa terkait informasi perkembangan realisasi pendapatan agar desa dapat menyesuaikan perencanaan anggaran secara tepat. Selain itu, apabila terjadi kelebihan atau kekurangan penyaluran, perlu dilakukan penyesuaian alokasi melalui perubahan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program desa tetap berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

P D	Sasaran/Progra m/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahun n (Rp)	Target Kinerja DPPA tahun n	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Kinerja tahun n	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerj a (%)	Capaian Realisas i Anggara n (%)	PK/ SKP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	42.000.000,00	79,61	45.508.000,00	64,50	44.308.000,00	0.00	97,36	BUPATI
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	42.000.000,00	sedang	45.508.000,00	rendah	44.308.000,00	0.00	97,36	KADIS
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Poin)	42.000.000,00	72,50	45.508.000,00	64,50	44.308.000,00	0.00	97,36	SEKDIS
	Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	42.000.000,00	3	45.508.000,00	3	44.308.000,00	100,00	97,36	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAI AN
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.000.000,00	3	45.508.000,00	3	44.308.000,00	100,00	97,36	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Pelayanan Publik	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0.00	0.00	BUPATI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat	0,00	Baik	0,00	Baik	0,00	0.00	0.00	KADIS
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0.00	0.00	KABID ADPEMDES
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.938.543.128,00	3.427	4.131.906.139,00		3.982.179.491,00	0,00	96,38	BUPATI
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD	3.938.543.128,00	A	4.131.906.139,00	A	3.982.179.491,00	0.00	96,38	KADIS
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP PD	3.938.543.128,00	80,32	4.131.906.139,00	80,40	3.982.179.491,00	0.00	96,38	SEKDIS

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahun n (Rp)	Target Kinerja DPPA tahun n	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Kinerja tahun n	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Kab/Kota									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	20.621.200,00	9	36.092.400,00	14	35.859.240,00	155,56	99,35	KASUBBAG P&P
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12.986.500,00	2	24.238.500,00	2	24.144.340,00	100,00	99,61	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.123.400,00	1	1.123.400,00	1	1.117.400,00	100,00	99,47	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.336.400,00	1	1.336.400,00	1	1.328.400,00	100,00	99,40	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	662.000,00	1	662.000,00	1	656.000,00	100,00	99,09	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.016.300,00	1	3.658.500,00	6	3.629.500,00	600,00	99,21	Kasubbag P&P

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahun n (Rp)	Target Kinerja DPPA tahun n	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Kinerja tahun n	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja a (%)	Capaian Realisasi i Anggaran n (%)	PK/ SKP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.890.000,00	1	1.890.000,00	1	1.879.000,00	100,00	99,42	Kasubbag P&P
	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.606.600,00	2	3.183.600,00	2	3.104.600,00	100,00	97,52	Kasubbag P&P
	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	3.617.003.528,00	5	3.696.189.439,00	5	3.608.864.864,00	100,00	97,64	Sekdis
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.551.927.328,00	35	3.631.113.239,00	35	3.545.378.464,00	100,00	97,64	Sekdis
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.510.000,00	1	60.510.000,00	1	59.631.000,00	100,00	98,55	Sekdis
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.622.650,00	1	1.622.650,00	1	1.349.850,00	100,00	83,19	Sekdis

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahun n (Rp)	Target Kinerja DPPA tahun n	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Kinerja tahun n	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.443.550,00	1	1.443.550,00	1	1.213.550,00	100,00	84,07	Sekdis
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.292.000,00	100,00	86,13	Sekdis
	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	165.907.500,00	4	264.613.400,00	4	217.426.730,00	100,00	82,17	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.310.000,00	1	1.310.000,00	1	1.166.000,00	100,00	89,01	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	128.684.500,00	10	197.247.400,00	14	152.399.000,00	140,00	77,26	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.288.000,00	12	6.288.000,00	12	5.597.000,00	100,00	89,01	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN

P D	Sasaran/Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.625.000,00	12	59.768.000,00	12	58.264.730,00	100,00	97,48	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	46.448.000,00	3	46.448.000,00	3	39.093.200,00	100,00	84,17	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.635.000,00	12	1.635.000,00	12	1.594.000,00	100,00	97,49	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40.200.000,00	12	40.200.000,00	12	33.466.200,00	100,00	83,25	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.613.000,00	12	4.613.000,00	12	4.033.000,00	100,00	87,43	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	88.562.900,00	3	88.562.900,00	3	80.935.457,00	100	91,39	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.600.000,00	15	3.600.000,00	5	1.337.227,00	33,33	37,15	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72.172.900,00	3	72.172.900,00	2	67.683.230,00	66,67	93,78	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.790.000,00	15	12.790.000,00	19	11.915.000,00	126,67	93,16	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Akses Keuangan Daerah	3.514.046.782,00					0.00	0.00	BUPATI

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tepat Waktu	3.514.046.782,00	100	3.862.674.018,00	22,29	3.647.396.318,00	22,29	94,43	KADIS
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	3.505.625.032,00	100	3.862.674.018,00	100	3.647.396.318,00	100,00	94,43	KABID ADPEMDES
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.505.625.032,00	157,00	3.862.674.018,00	157	3.647.396.318,00	100,00	94,43	JF
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16.085.000,00	5	16.085.000,00	5	14.837.000,00	100,00	92,24	JF
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	54.565.500,00	31	241.451.500,00	50	51.074.500,00	161,29	21,15	JF
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.487.543.582	2	2.630.508.368,00	2	2.626.232.368,00	100,00	99,84	JF

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahun n (Rp)	Target Kinerja DPPA tahun n	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Kinerja tahun n	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja a (%)	Capaian Realisasi Anggaran n (%)	PK/ SKP
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	13.608.000,00	1	42.608.000,00	1	42.186.840,00	100,00	99,01	JF
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	695.802.000	157	751.346.200	157	746.715.200	100,00	99,38	Kabid PUEKD
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	40.033.500,00	1	38.243.500	1	29.841.500	100,00	78,03	JF
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	113.965.950,00	4	92.435.950	16	87.120.290	400	94,25	Kabid Penataan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	84.021.500,00	157	49.995.500	157	49.388.620	100	98,79	JF
	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	8.421.750,00	64,33	7.371.750,00	64,33	4.491.750,00	100	60,93	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama	8.421.750,00	7	7.371.750,00	7	4.491.750,00	100	60,93	JF

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	3.487.250,00	1	3.137.250,00	1	1.361.250,00	100	43,39	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	1.711.250,00	1	1.361.250,00	1	1.361.250,00	100	100,00	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3.223.250,00	1	2.873.250,00	1	1.769.250,00	100	61,58	Kabid PUEKD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Infrastruktur Daerah	26.318.000,00		26.318.000,00		24.775.000,00	0.00	94,14	BUPATI
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa	26.318.000,00	14971,05	26.318.000,00	14971,05	24.775.000,00	100	94,14	KADIS
	PENATAAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	26.318.000,00	8,28	26.318.000,00	16,56	24.775.000,00	200,00	94,14	Kabid Penatan Desa
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa	26.318.000,00	4	26.318.000,00	17	24.775.000,00	425,00	94,14	Kabid Penatan Desa

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13.860.000,00	2	13.860.000,00	13	12.761.000,00	650,00	92,07	Kabid Penatan Desa
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	12.458.000,00	2	12.458.000,00	4	12.014.000,00	200,00	96,44	Kabid Penatan Desa
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan	39.582.500,00				92.757.100,00	0.00	0.00	BUPATI
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal	Rata - Rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	39.582.500	133.106.651	98.807.700,00	115.340.213	92.757.100,00	86,65	93,88	KADIS
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	39.582.500,00	12,68	98.807.700,00	12,68	92.757.100,00	100,00	93,88	KABID KELDES DAN SOSBUDMAS Y

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan	39.582.500,00	7	98.807.700,00	7	92.757.100,00	100,00	93,88	KABID KELDES DAN SOSBUDMASY
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27.845.000,00	7	87.410.200,00	52	83.103.600,00	742,86	95,07	KABID KELDES DAN SOSBUDMASY

P D	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahunan (Rp)	Target Kinerja DPPA tahunan	Alokasi Anggaran DPPA tahunan (Rp)	Realisasi Kinerja tahunan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3.325.250,00	7	2.985.250,00	7,00	1.361.250,00	100,00	45,60	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8.412.250,00	3	8.412.250,00	2	8.292.250,00	66,67	98,57	Kabid PUEKD

h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	88,97	KADIS		Tidak Mencapai Target			
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Poin)	88,97	SEKDIS	Masih ada pegawai yang belum melengkapi dokumen pada ASN Digital		Tidak Mencapai Target		
	Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	1. Mekanisme pembayaran honorarium tenaga non-ASN yang diatur berdasarkan absensi/hari kerja efektif. Adanya hari libur dan cuti bersama yang mengakibatkan alokasi anggaran yang telah disusun tidak dapat diserap maksimal.2. Terjadi peralihan dari honor daerah menjadi outsoucing dikarenakan ada tenaga kebersihan yang lulus PPPK			Mencapai Target	

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	1. Mekanisme pembayaran honorarium tenaga non-ASN yang diatur berdasarkan absensi/hari kerja efektif. Adanya hari libur dan cuti bersama yang mengakibatkan alokasi anggaran yang telah disusun tidak dapat diserap maksimal.2. Terjadi peralihan dari honor daerah menjadi outsoucing dikarenakan ada tenaga kebersihan yang lulus PPPK				Mencapai Target
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Pelayanan Publik	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat	100,00	KADIS	Sosialisasi, pelaksanaan dan pengolahan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terlaksana menggunakan sumber daya yang ada	Mencapai Target			
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0.00	KABID ADPEMDES	Tidak ada anggaran		Tidak Mencapai Target		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0.00	BUPATI					

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD	100,10	KADIS		Mencapai Target			
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Nilai AKIP PD	100,10	SEKDIS			Mencapai Target		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	155,56	KASUBBAG RENLAP				Mencapai Target	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	600,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	100,00	Sekdis				Mencapai Target	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	Sekdis					Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN				Mencapai Target	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat dua kondisi yang terjadi pada sub kegiatan ini :1. Salah satu item belanja modal tidak dapat dieksekusi karena pagu di DPA lebih rendah dibandingkan harga pasar rill saat pengadaan.2. Penambahan anggaran pada DPA Perubahan berhasil meningkatkan volume pengadaan, namun tidak dibarengi dengan penyesuaian target pada dokumen perencanaan				Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Adanya efisiensi biaya perjalanan dinas yakni pemilihan biaya penginapan yang lebih rendah atau biaya transpotasi yang digunakan lebih rendah (Lumsum vs Rill).				Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN				Mencapai Target	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Adanya kebijakan internal penghematan energi misalnya : mematikan AC dan lampu setelah jam kerja, menggunakan air secukupnya yang berhasil menekan tagihan atau pemakaian bulanan.				Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN				Mencapai Target	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33,33	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Berdasarkan data dilapangan, terdapat dua kendala utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dancapaian fisik :1. Kendala Prosedur Pembayaran dimana kebijakan atau kebiasaan dimana pemegang kendaraan dinas menalangi biaya pajak terlebih dahulu sebelum dilakukan penggantian (SPJ). Hal ini menyebabkan keengganan atau keterbatasan finansial pemegang kendaraan untuk membayarpajak tepat waktu.2. Terdapat 4 unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat yang telah dikembalikan, sehingga secara otomatis tidak dapat dilakukan pembayaran pajaknya.				Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66,67	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	1 Unit Kendaraan Dinas operasional roda 4 Sudah tidak dapat dioperasikan lagi (rusak beraat dan anggarannya hanya tersedia untuk 2 unit kendaraan dinas operasional (baik Pemeliharaan maupun pembayaran pajaknya).				Tidak Mencapai Target
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126,67	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN					Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Akses Keuangan Daerah	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tepat Waktu	22,29	KADIS		Tidak Mencapai Target			
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100,00	KABID ADPEMDES			Mencapai Target		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,00	JF				Mencapai Target	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan, seluruhnya kewajiban kepala desa terhadap penyampaian administrasi penyelenggaraan pemerintahan telah terpenuhi.				Mencapai Target
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	161,29	JF	pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa seharusnya Target Kinerja Renstra hanya 1 dokumen dan Target Kinerja Renja seharusnya 157 desa.				Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan, seluruhnya kewajiban kepala desa terhadap penyampaian laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes disampaikan sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam Kemendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup nomor 94 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.				Mencapai Target
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan terkait dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa karena telah idlakukan fasilitasi terhadap proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa merah putih				Mencapai Target
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100,00	Kabid PUEKD	Berdasarkan dokumen laporan yang disampaikan oleh masing-masing BumDesa telah dilakukan pemeringkatan dengan kategori sebagai berikut : Perintis (98), Pemula (51), Berkembang (6), Maju (5).				Mencapai Target
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan terhadap sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	400,00	Kabid Penataan Desa	- Beberapa segmen batas desa belum mencapai kesepakatan- Ada Desa dan Kecamatan yang belum ditemukan Perda Pembentukannya- Sulitnya mencapai kesepakatan batas antar Desa				Mencapai Target
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100,00	JF	0				Mencapai Target
	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	100,00	Kabid PUEKD			Mencapai Target		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama	100,00	JF				Mencapai Target	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	100,00	Kabid PUEKD	Masih Kurangnya koordinasi Desa dalam melibatkan instansi terkait (DPMD) dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar Desa.				Mencapai Target
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	100,00	Kabid PUEKD	Belum Semua Desa Menyerahkan Dokumen Perjanjian Kerjasama				Mencapai Target
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100,00	Kabid PUEKD	sejak penyegaran pengurus yang kedua, bumdesma pkp jasa prima tidak berjalan dengan baik				Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Infrastruktur Daerah	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa	100	KADIS		Mencapai Target			
	PENATAAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	200,00	Kabid Penatan Desa			Mencapai Target		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa	425,00	Kabid Penatan Desa				Mencapai Target	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	650,00	Kabid Penatan Desa	sudah difasilitasi sebanyak 13 Desa perubahan nama dusun menyesuaikan dengan dokumen kependudukan dan peraturan Bupati Sumbawa tentang nama Dusun				Mencapai Target
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	200,00	Kabid Penatan Desa	Masih banyak Desa yang belum melakukan penataan kewenangan Desa dan menyusun Perdes Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa				Mencapai Target
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Pengeluaran perkapita yang di sesuaikan	0.00	BUPATI					

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	desa								
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal	Rata - Rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	86,65	KADIS		Tidak Mencapai Target			
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	100,00	KABID KELDES DAN SOSBUDMASY			Mencapai Target		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan	100,00	JF				Mencapai Target	

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	742,86		Capaian Kinerja Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat telah melebihi target jumlah dokumen. Per Juli 2025 tercatat capaian kinerja sebanyak 52 dokumen. Jumlah tersebut meliputi penataan kelembagaan Tim Pembina Posyandu, Kepengurusan Posyandu, dan PKK. Meski demikian, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kinerja (evaluasi/perbaikan tahun anggaran selanjutnya) yaitu: 1. Pembinaan untuk penataan kelembagaan belum menyeluruh ke kelembagaan yang lain seperti Karang Taruna, Masyarakat Hukum Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, RT, RW dan LPM. Sejauh ini pembinaan masih terfokus pada kelembagaan Posyandu. 2. telah diajukan surat Bupati Sumbawa tentang Permohonan nomor register Posyandu Tahap I hasil penataan kelembagaan LKD/LKK khususnya Posyandu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, sebanyak 367 lembaga posyandu terdiri atas 296 SK Kepengurusan dan kader Posyandu yang berkedudukan di Desa dan 71 SK Kepengurusan dan kader Posyandu yang berkedudukan di				Mencapai Target

PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
					Kelurahan dengan dokumen pendukung pengajuan nomor register Posyandu yaitu 71 SK Tim Pembina Posyandu Kecamatan, 91 SK Tim Pembina Posyandu Desa, 7 SK Tim Pembina Posyandu Kelurahan. Saat ini sedang dalam proses verifikasi usulan dimaksud oleh Ditjen BIna Pemerintahan Desa kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi perhatian untuk terus dapat dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada Desa/Kelurahan dan pembinaan TP Posyandu Kecamatan/Desa/Kelurahan serta pendampingan agar 754 posyandu semakin maju dna berkembang dan terlaksanakan posyandu 6 SPM.				
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100,00	Kabid PUEKD	Masih Banyak BumDesa yang tidak berjalan sehingga tidak dapat memberikan kontribusi kepada PADesa				Mencapai Target
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	66,67	Kabid PUEKD	Masih kurang nya koordinasi posyantek kecamatan dengan Desa dalam menjaring penemu TTG				Mencapai Target

BAB IV

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun sesuai amanat yang tertuang dalam Parturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 terjabarkan dalam Misi 2 (dua) Misi 3 (tiga) dan Misi 5 (Lima). Gambaran kinerja tujuan DPMD Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, Adapun Kinerja Tujuan adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Indikator Sasaran Tujuan (IST-PD) sebagai berikut:

1. Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)
2. Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)
3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) (Poin)
4. Indeks Pelayanan Publik (poin)
5. Indeks Infrastruktur Daerah (poin)
6. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)

adapun penjabaran Sasaran Perangkat Daerah pertama (S-PD-1) Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah pertama (ISS-PD-1) Kategori Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah, Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Kedua (S-PD-2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kedua (ISS-PD-2) Kategori AKIP Perangkat Daerah, Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Ketiga (S-PD-3) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Ketiga (ISS-PD-3) Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu, penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Keempat (S-PD-4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Keempat (ISS-PD-4) Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat, Sasaran Perangkat Daerah Kelima (S-PD-5) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kelima (ISS-PD-5) Indeks Desa, penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Keenam (S-PD-6) Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Keenam (ISS-PD-6) Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa.

Dari hasil olahan data dihasilkan bahwa Capaian Kinerja DPMD pada (ISS-PD-1) sebesar 88,97% (ISS-PD-2) sebesar 100% (ISS-PD-3) Sebesar 100% (ISS-PD-4) sebesar 100% (ISS-PD-5) sebesar 100% dan (ISS-PD-6) sebesar 86,65% atau dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran pada (ISS-PD-1) dan (ISS-PD-6) berkisar antara 76 - ≤ 90 (ISS-PD-1) atau berada dalam interval dengan kriteria penilaian realisasi kinerja " tinggi" karena pencapaian atau realisasi capaian kinerja telah terpenuhi dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. sedangkan Capaian Kinerja DPMD pada (ISS-PD-2) (ISS-PD-3) (ISS-PD-4) (ISS-PD-5) berkisar antara 91 - ≤ 100 atau berada dalam interval dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat tinggi" karena pencapaian atau realisasi capaian kinerja telah terpenuhi dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan kinerja ini di masa yang akan datang.

Besar harapan kami bahwa LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita ke depan untuk membangun Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera.

Sumbawa Besar, 26 Maret 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Fungsi

- a). perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b). pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas

- a. menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penataan Desa, administrasi Pemerintahan Desa, pengembangan usaha ekonomi dan kerja sama Desa dan kelembagaan Desa dan sosial budaya masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Indikator Kinerja Utama DPMD TAHUN 2025

N O	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUA N	RUMUSAN IKU	PENANGGU NG JAWAB	KET
1	2	3	4	5		6
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD	Kategori AKIP PD	Katego ri	Jumlah Nilai Variabel Evaluasi AKIP Tahun n-1	KADIS	Diukur tahuna n
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP PD	Nilai	Jumlah Nilai Variabel Evaluasi AKIP Tahun n-1	SEKDIS	Diukur tahunan
B	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Katego ri	Kategori IPASN dari link https://asndigital.bkn.go.id/	KADIS	Diukur tahuna n
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	Nilai IPASN dari link https://asndigital.bkn.go.id/	SEKDIS	Diukur tahunan
C	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa	Poin	Total Nilai Indeks Desa Tahun N	KADIS	Diukur tahuna n
2.	Program Penataan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	%	Jumlah Desa yang sudah difasilitasi dalam pelaksanaan Penataan Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100	Kabid Penataan Desa dan PSDA	Diukur tahunan
D	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawab an Realisasi APBDesa tepat wa ktu	%	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawab an Realisasi APBDesa tepat wakt u/ Total Desa kali 100	KADIS	Diukur tahuna n

N O	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUA N	RUMUSAN IKU	PENANGGU NG JAWAB	KET
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	%	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama sampai dengan Tahun n di bagi jumlah Desa Tahun n dikali 100	Bidang Pengembang an Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	diukur tahunan
E	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawab an Realisasi APBDesa tepat wa ktu	%	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawab an Realisasi APBDesa tepat wakt u/ Total Desa kali 100	KADIS	Diukur tahuna n
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	%	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam tata kelola administrasi Pemerintahan Desa Tahun n dibagi total Desa Tahun n dikali 100	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	diukur tahunan
F	Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rp	Total BHPRD yang di salurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun N	KADIS	Diukur tahuna n
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	Rata- Rata	Realisasi Rata-rata BHPRD yang disalurkan ke desa Tahun N di bagi Total Desa Tahun N dikali 100	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	diukur tahunan

3. INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DPMD TAHUN 2025

IP-ASN DPMD TAHUN 2025	PNS					
	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL	KATEGORI
	22,50	22,17	24,33	5,00	74,00	SEDANG
	PPPK					
	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL	KATEGORI
	20,00	12,50	17,50	5,00	55,00	SANGAT RENDAH
TOTAL					129,00	
RATA - RATA IP-ASN DPMD TAHUN 2025					64,50	RENDAH

4. SAKIP DPMD TAHUN 2025

NO	KOMPONEN / SUB KOMPONEN / KRITERIA	BOBOT	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	
			TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	28,75	25,37
2	Pengukuran Kinerja	30,00	16,95	22,82
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,90	11,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,67	20,88
Nilal Akuntabilitas Kinerja DPMD TA 2024 & TA 2025			80,27	80,40
Kategori			A	A

5. KATEGORI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DPMD TAHUN 2025

Tabel Kesimpulan Hasil IKM

Nilai IKM Tertimbang	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
3.204	80.10	B	Baik

Nama Pelayanan Kepuasan Dinas PMD	
Responden	
Jumlah Responden	
Jenis Kelamin	: Laki-laki = 195 Perempuan = 136
Pendidikan	: SD = 1 SMP = 1 SMA/Sederajat = 147 S1/D4/Sederajat = 171 S2 = 7 S3 = 0 Yang lain = 4
Periode Survei	: 2025

Nilai IKM
80,10
(Baik)

6. INDEKS DESA TAHUN 2025

Indikator Pengukuran Indeks Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT No 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa) sbb:

INDEKS DESA (ID) STRATA MANDIRI TAHUN 2025

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	SKOR DIMENSI						TOTAL SKOR ID	SKOR ID (%)	KELAS SKOR ID (STATUS ID 2025)	STATUS IDM 2024
					LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA				
1	SUMBAWA	LUNYUK	5204022001	LUNYUK REA	157	73	116	60	48	67	101,76	82,08	MANDIRI	MANDIRI
2	SUMBAWA	LUNYUK	5204022002	LUNYUK ODE	153	60	138	66	49	65	105,17	84,83	MANDIRI	MANDIRI
3	SUMBAWA	LUNYUK	5204022007	PADA SUKA	146	72	111	74	46	73	100,00	80,66	MANDIRI	MANDIRI
4	SUMBAWA	LUNYUK	5204022008	SUKAMAJU	144	73	116	62	48	78	99,95	80,62	MANDIRI	MANDIRI
5	SUMBAWA	ALAS	5204052001	LUAR	131	78	128	80	49	72	102,03	82,30	MANDIRI	MANDIRI
6	SUMBAWA	ALAS	5204052002	BARU	130	76	139	78	46	60	102,24	82,47	MANDIRI	MANDIRI
7	SUMBAWA	ALAS	5204052003	KALIMANGO	154	82	120	82	48	73	107,04	86,34	MANDIRI	MANDIRI
8	SUMBAWA	ALAS	5204052005	JURAN ALAS	155	63	120	78	49	64	103,14	83,19	MANDIRI	MANDIRI
9	SUMBAWA	ALAS	5204052006	DALAM	167	67	137	60	47	65	108,59	87,59	MANDIRI	MANDIRI
10	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092001	MOYO	151	77	147	74	46	77	111,59	90,01	MANDIRI	MANDIRI
11	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092003	NGERU	132	73	141	46	46	70	99,60	80,34	MANDIRI	MANDIRI
12	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092004	BERARE	155	71	139	86	48	80	112,07	90,40	MANDIRI	MANDIRI
13	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092005	POTO	153	84	126	62	42	51	102,47	82,66	MANDIRI	MANDIRI
14	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092009	SERADING	152	79	143	82	47	76	112,20	90,50	MANDIRI	MANDIRI
15	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092013	MOYO MEKAR	151	77	147	74	46	77	111,59	90,01	MANDIRI	MANDIRI
16	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102002	SEMAMUNG	154	71	113	78	47	70	102,78	82,90	MANDIRI	MANDIRI
17	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102004	BATU TERING	150	73	103	76	49	68	99,08	79,92	MANDIRI	MANDIRI
18	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102005	BATU BULAN	133	78	118	74	49	69	98,82	79,71	MANDIRI	MANDIRI
19	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102008	LESENG	133	78	118	70	49	78	99,39	80,17	MANDIRI	MANDIRI
20	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102010	MARGA KARYA	147	78	110	68	50	70	99,91	80,59	MANDIRI	MANDIRI
21	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102012	BRANG REA	157	78	96	70	49	66	98,76	79,66	MANDIRI	MANDIRI

22	SUMBAWA	ROPANG	5204112008	ROPANG	157	67	131	72	46	56	104,89	84,61	MANDIRI	MANDIRI
23	SUMBAWA	LAPE	5204122003	LAPE	156	46	120	62	48	79	100,68	81,21	MANDIRI	MANDIRI
24	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132003	MUER	149	70	112	78	44	65	100,19	80,81	MANDIRI	MANDIRI
25	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132004	PLAMPANG	165	71	110	67	45	62	102,24	82,47	MANDIRI	MANDIRI
26	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132005	TELUK SANTONG	157	75	114	59	44	60	100,18	80,81	MANDIRI	MANDIRI
27	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132007	SEPAKAT	152	52	124	71	45	65	100,69	81,22	MANDIRI	MANDIRI
28	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132012	SELANTEH	153	76	108	58	47	72	99,34	80,13	MANDIRI	MANDIRI
29	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132013	BRANG KOLONG	157	73	103	64	47	67	98,97	79,83	MANDIRI	MANDIRI
30	SUMBAWA	EMPANG	5204142003	EMPANG ATAS	146	61	126	62	48	74	100,89	81,38	MANDIRI	MANDIRI
31	SUMBAWA	EMPANG	5204142004	EMPANG BAWA	135	72	127	62	48	74	99,67	80,40	MANDIRI	MANDIRI
32	SUMBAWA	EMPANG	5204142013	GAPIT	134	77	120	74	48	68	99,25	80,06	MANDIRI	MANDIRI
33	SUMBAWA	EMPANG	5204142014	PAMANTO	138	66	124	64	47	79	99,75	80,46	MANDIRI	MANDIRI
34	SUMBAWA	EMPANG	5204142015	BUNGA EJA	152	75	110	60	48	70	99,55	80,30	MANDIRI	MANDIRI
35	SUMBAWA	EMPANG	5204142016	JOTANG BERU	158	73	98	74	48	65	99,22	80,03	MANDIRI	MANDIRI
36	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172002	MAPIN KEBAK	152	77	124	66	48	64	103,44	83,44	MANDIRI	MANDIRI
37	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172003	LABUHAN MAPIN	163	82	132	78	49	79	112,74	90,94	MANDIRI	MANDIRI
38	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172004	LEKONG	165	80	106	84	49	74	106,68	86,05	MANDIRI	MAJU
39	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172005	GONTAR	156	76	127	86	48	72	108,98	87,90	MANDIRI	MANDIRI
40	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172008	MAPIN BERU	137	77	127	78	49	75	103,35	83,36	MANDIRI	MANDIRI
41	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	5204182001	LABUHAN BADAS	151	83	119	86	49	69	106,26	85,71	MANDIRI	MANDIRI
42	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	5204182002	KARANG DIMA	141	76	139	77	46	61	105,17	84,83	MANDIRI	MANDIRI
43	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	5204182003	LABUHAN SUMBAWA	156	85	156	86	49	57	115,68	93,31	MANDIRI	MANDIRI
44	SUMBAWA	LABANGKA	5204192001	LABANGKA	135	75	132	74	42	77	102,94	83,03	MANDIRI	MANDIRI
45	SUMBAWA	LABANGKA	5204192002	SEKOKAT	146	69	122	54	47	71	99,36	80,15	MANDIRI	MAJU
46	SUMBAWA	LABANGKA	5204192003	SUKA MULYA	155	78	118	70	47	70	104,11	83,98	MANDIRI	MANDIRI
47	SUMBAWA	LABANGKA	5204192005	JAYA MAKMUR	138	71	138	66	48	72	103,43	83,42	MANDIRI	MANDIRI
48	SUMBAWA	BUER	5204202004	LABUHAN BURUNG	168	71	124	72	49	69	108,48	87,50	MANDIRI	MANDIRI
49	SUMBAWA	BUER	5204202005	PULAU KAUNG	146	75	117	70	48	64	100,37	80,96	MANDIRI	MANDIRI
50	SUMBAWA	RHEE	5204212001	RHEE	150	83	134	77	49	72	108,88	87,82	MANDIRI	MANDIRI

51	SUMBAWA	RHEE	5204212003	LUK	145	79	119	77	49	76	103,73	83,67	MANDIRI	MAJU
52	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222004	JOROK	141	78	116	68	49	69	99,61	80,34	MANDIRI	MANDIRI
53	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222005	KERATO	158	79	126	64	49	52	104,10	83,97	MANDIRI	MANDIRI
54	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222006	PUNGKA	137	78	124	66	49	70	100,40	80,98	MANDIRI	MANDIRI
55	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222007	UMA BERINGIN	158	79	126	64	49	68	106,12	85,60	MANDIRI	MANDIRI
56	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222008	NIJANG	141	78	126	68	49	62	101,25	81,67	MANDIRI	MANDIRI
57	SUMBAWA	MOYO UTARA	5204232002	SEBEWE	149	79	128	76	49	70	106,17	85,63	MANDIRI	MANDIRI
58	SUMBAWA	MOYO UTARA	5204232005	BARU TAHAN	141	76	139	78	49	37	102,52	82,69	MANDIRI	MANDIRI
59	SUMBAWA	MOYO UTARA	5204232006	SONGKAR	168	81	126	76	49	80	112,28	90,56	MANDIRI	MANDIRI
60	SUMBAWA	MARONGE	5204242001	SIMU	143	79	101	78	49	80	99,30	80,10	MANDIRI	MANDIRI
61	SUMBAWA	MARONGE	5204242002	MARONGE	153	76	96	82	49	71	99,75	80,46	MANDIRI	MAJU
62	SUMBAWA	TARANO	5204252002	LABUHAN BONTONG	155	75	121	76	48	68	105,14	84,81	MANDIRI	MANDIRI
63	SUMBAWA	TARANO	5204252004	LABUHAN JAMBU	158	75	115	72	49	69	104,07	83,94	MANDIRI	MANDIRI
64	SUMBAWA	LOPOK	5204262001	PUNGKIT	147	74	113	68	49	70	100,05	80,70	MANDIRI	MANDIRI
65	SUMBAWA	LOPOK	5204262002	BERORA	135	72	123	86	46	71	101,53	81,89	MANDIRI	MANDIRI
66	SUMBAWA	LOPOK	5204262003	LOPOK	145	78	120	76	48	66	102,36	82,57	MANDIRI	MANDIRI
67	SUMBAWA	LOPOK	5204262004	LANGAM	151	76	141	64	49	62	106,87	86,20	MANDIRI	MANDIRI
68	SUMBAWA	LOPOK	5204262005	MAMA	149	64	103	84	48	78	99,92	80,60	MANDIRI	MANDIRI
69	SUMBAWA	LOPOK	5204262006	LOPOK BERU	133	78	113	86	48	76	100,06	80,71	MANDIRI	MAJU
70	SUMBAWA	LOPOK	5204262007	TATEDE	161	83	144	78	49	69	114,10	92,04	MANDIRI	MAJU
71	SUMBAWA	LENANGGUAR	5204272002	LENANGGUAR	152	74	135	46	49	60	102,55	82,72	MANDIRI	MANDIRI

INDEKS DESA STRATA MAJU TAHUN 2025

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	SKOR DIMENSI						TOTAL SKOR ID	SKOR ID (%)	KELAS SKOR ID (STATUS ID 2025)	STATUS IDM 2024
					LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA				
1	SUMBAWA	LUNYUK	5204022003	JAMU	141	68	77	65	37	67	86,82	70,03	MAJU	BERKEMBANG
2	SUMBAWA	LUNYUK	5204022009	PERUNG	120	69	113	64	40	65	90,25	72,79	MAJU	MAJU
3	SUMBAWA	LUNYUK	5204022010	EMANG LESTARI	127	73	95	63	45	63	88,12	71,08	MAJU	MAJU
4	SUMBAWA	ALAS	5204052004	MARENTE	127	58	123	72	48	69	95,43	76,98	MAJU	MAJU
5	SUMBAWA	ALAS	5204052007	PULAU BUNGIN	118	74	110	69	45	60	90,10	72,67	MAJU	BERKEMBANG
6	SUMBAWA	ALAS	5204052012	LABUHAN ALAS	142	67	96	50	43	54	88,45	71,34	MAJU	MAJU
7	SUMBAWA	UTAN	5204062001	STOWE BRANG	136	72	107	68	49	65	94,69	76,38	MAJU	MAJU
8	SUMBAWA	UTAN	5204062002	LABUHAN BAJO	142	66	100	61	48	59	91,91	74,13	MAJU	BERKEMBANG
9	SUMBAWA	UTAN	5204062003	PUKAT	122	76	93	68	49	66	88,08	71,05	MAJU	MAJU
10	SUMBAWA	UTAN	5204062004	ORONG BAWA	137	56	101	50	47	59	87,84	70,85	MAJU	MAJU
11	SUMBAWA	UTAN	5204062005	JOROK	145	79	92	72	47	68	95,05	76,67	MAJU	MAJU
12	SUMBAWA	UTAN	5204062006	MOTONG	114	67	126	74	47	65	93,62	75,51	MAJU	MAJU
13	SUMBAWA	UTAN	5204062007	TENGAH	127	80	76	72	46	67	86,13	69,47	MAJU	MAJU
14	SUMBAWA	UTAN	5204062008	SABEDO	115	73	117	62	48	71	91,55	73,85	MAJU	MAJU
15	SUMBAWA	UTAN	5204062012	BALE BRANG	140	81	87	54	46	69	90,21	72,77	MAJU	BERKEMBANG
16	SUMBAWA	BATU LANTEH	5204072001	BATU ROTOK	133	68	90	58	37	68	87,09	70,25	MAJU	MAJU
17	SUMBAWA	BATU LANTEH	5204072004	TEPAL	137	66	82	81	43	69	89,73	72,38	MAJU	MAJU

18	SUMBAWA	BATU LANTEH	5204072005	BATU DULANG	118	76	110	64	36	70	90,21	72,76	MAJU	MAJU
19	SUMBAWA	BATU LANTEH	5204072006	KELUNGKUNG	146	50	104	54	47	68	91,91	74,13	MAJU	MAJU
20	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092002	KAKIANG	131	74	89	76	38	66	89,48	72,18	MAJU	MAJU
21	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092010	OLAT RAWA	104	55	124	62	49	68	87,66	70,71	MAJU	BERKEMBANG
22	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092011	BATU BANGKA	104	55	124	62	49	68	87,66	70,71	MAJU	MAJU
23	SUMBAWA	MOYO HILIR	5204092014	LABUHAN IJUK	130	59	121	54	35	75	93,05	75,05	MAJU	MAJU
24	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102003	SEBASANG	134	71	77	64	49	69	86,40	69,69	MAJU	MAJU
25	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102006	MOKONG	140	72	74	74	47	74	89,28	72,01	MAJU	MAJU
26	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102007	PERNEK	137	77	93	70	49	69	92,89	74,93	MAJU	MAJU
27	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102009	LITO	130	73	89	60	41	64	86,80	70,01	MAJU	MAJU
28	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102011	MAMAN	152	69	80	70	49	30	87,64	70,69	MAJU	MAJU
29	SUMBAWA	ROPANG	5204112002	LEBIN	146	49	88	70	31	59	87,61	70,67	MAJU	MAJU
30	SUMBAWA	ROPANG	5204112003	LEBANGKAR	144	52	94	74	48	53	90,14	72,71	MAJU	MAJU
31	SUMBAWA	ROPANG	5204112009	LAWIN	140	75	103	62	45	59	93,24	75,21	MAJU	MAJU
32	SUMBAWA	ROPANG	5204112010	RANAN	133	44	95	70	45	59	86,33	69,63	MAJU	MAJU
33	SUMBAWA	LAPE	5204122005	LABUHAN KURIS	110	75	106	72	42	68	88,28	71,20	MAJU	BERKEMBANG
34	SUMBAWA	LAPE	5204122006	DETE	142	75	98	50	46	74	92,78	74,84	MAJU	MAJU
35	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132006	SEPAYUNG	145	64	82	56	45	60	87,09	70,24	MAJU	MAJU
36	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132008	UPT. PRODE SP.I	126	67	95	59	42	64	86,37	69,67	MAJU	MAJU
37	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132014	USAR	147	68	92	54	45	63	90,77	73,22	MAJU	MAJU
38	SUMBAWA	EMPANG	5204142001	BOAL	132	77	106	70	47	71	94,92	76,57	MAJU	MAJU
39	SUMBAWA	EMPANG	5204142002	JOTANG	130	55	98	68	48	69	88,97	71,76	MAJU	MAJU
40	SUMBAWA	EMPANG	5204142005	ONGKO	138	54	86	70	44	66	87,54	70,61	MAJU	MAJU
41	SUMBAWA	EMPANG	5204142012	LAMENTA	147	50	101	68	49	72	94,06	75,87	MAJU	MAJU
42	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172001	MAPIN REA	137	75	116	62	48	62	96,32	77,70	MAJU	MAJU
43	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172006	USAR MAPIN	151	70	104	54	47	63	95,29	76,86	MAJU	MAJU
44	SUMBAWA	ALAS BARAT	5204172007	GONTAR BARU	135	65	117	54	48	53	92,43	74,56	MAJU	MAJU
45	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	5204182004	LABUHAN AJI	118	57	120	88	45	63	93,41	75,34	MAJU	BERKEMBANG
46	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	5204182006	BAJO MEDANG	134	40	105	68	47	73	90,22	72,77	MAJU	BERKEMBANG

47	SUMBAWA	LABANGKA	5204192004	SUKA DAMAI	155	71	110	44	46	62	96,39	77,75	MAJU	MAJU
48	SUMBAWA	BUER	5204202001	TARUSA	139	67	103	56	48	67	92,29	74,44	MAJU	MAJU
49	SUMBAWA	BUER	5204202002	JURU MAPIN	132	65	110	60	47	64	92,02	74,23	MAJU	MAJU
50	SUMBAWA	BUER	5204202003	KALABESO	125	64	110	62	49	65	90,58	73,07	MAJU	MAJU
51	SUMBAWA	BUER	5204202006	BUIN BARU	127	76	110	68	48	61	92,99	75,01	MAJU	MAJU
52	SUMBAWA	RHEE	5204212002	SAMPE	133	76	104	67	46	66	93,42	75,35	MAJU	BERKEMBANG
53	SUMBAWA	RHEE	5204212004	RHEE LOKA	132	65	119	82	39	65	96,91	78,17	MAJU	MAJU
54	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222001	PELAT	128	79	116	66	49	51	93,71	75,59	MAJU	MAJU
55	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222002	KEREKEH	138	78	120	70	49	38	96,19	77,59	MAJU	MAJU
56	SUMBAWA	UNTER IWES	5204222003	BOAK	136	79	122	66	49	44	96,48	77,82	MAJU	MAJU
57	SUMBAWA	MOYO UTARA	5204232001	PUNGKIT	138	68	120	61	48	66	97,03	78,26	MAJU	MAJU
58	SUMBAWA	MOYO UTARA	5204232003	PENYARING	132	67	95	48	41	71	87,22	70,35	MAJU	MAJU
59	SUMBAWA	MOYO UTARA	5204232004	KUKIN	116	70	107	73	34	67	88,85	71,67	MAJU	MAJU
60	SUMBAWA	MARONGE	5204242003	PEMASAR	142	65	91	66	45	66	90,86	73,29	MAJU	MAJU
61	SUMBAWA	MARONGE	5204242004	LABUHAN SANGORO	130	59	119	62	46	65	93,28	75,24	MAJU	MAJU
62	SUMBAWA	TARANO	5204252001	BANTULANTEH	135	58	102	62	40	65	89,73	72,38	MAJU	MAJU
63	SUMBAWA	TARANO	5204252003	LABUHAN AJI	153	48	87	66	45	60	89,76	72,40	MAJU	MAJU
64	SUMBAWA	TARANO	5204252005	MATA	130	63	105	70	37	66	90,84	73,27	MAJU	MAJU
65	SUMBAWA	TARANO	5204252006	TOLO' OI	148	70	93	70	42	66	93,97	75,80	MAJU	MAJU
66	SUMBAWA	TARANO	5204252007	BANDA	141	70	90	72	47	61	91,39	73,71	MAJU	MAJU
67	SUMBAWA	TARANO	5204252008	LABUHAN PIDANG	134	47	103	58	40	66	87,80	70,82	MAJU	MAJU
68	SUMBAWA	LENANGGUAR	5204272001	TATEBAL	136	69	88	60	44	60	87,35	70,45	MAJU	MAJU
69	SUMBAWA	LENANGGUAR	5204272003	LEDANG	133	65	98	64	41	60	88,86	71,67	MAJU	BERKEMBANG
70	SUMBAWA	LANTUNG	5204292001	LANTUNG	147	54	78	54	46	68	86,08	69,43	MAJU	MAJU
71	SUMBAWA	LANTUNG	5204292002	SEPUKUR	144	57	75	62	48	68	86,21	69,54	MAJU	MAJU
72	SUMBAWA	LANTUNG	5204292003	AI MUAL	136	64	84	60	44	65	86,30	69,61	MAJU	MAJU
73	SUMBAWA	LANTUNG	5204292004	PADESA	145	68	72	60	49	64	86,49	69,76	MAJU	MAJU

INDEKS DESA STRATA BERKEMBANG TAHUN 2025

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	SKOR DIMENSI						TOTAL SKOR ID	SKOR ID (%)	KELAS SKOR ID (STATUS ID 2025)	STATUS IDM 2024
					LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA				
1	SUMBAWA	BATU LANTEH	5204072002	TANGKAM PULIT	108	71	77	58	31	57	75,66	61,03	BERKEMBANG	BERKEMBANG
2	SUMBAWA	BATU LANTEH	5204072003	BAO DESA	93	78	80	74	39	58	76,36	61,60	BERKEMBANG	BERKEMBANG
3	SUMBAWA	MOYO HULU	5204102001	SEMPE	134	69	75	56	37	64	82,92	66,89	BERKEMBANG	BERKEMBANG
4	SUMBAWA	LAPE	5204122009	HIJRAH	118	63	87	45	30	69	79,38	64,03	BERKEMBANG	BERKEMBANG
5	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132009	UPT. PRODE SP II	138	62	54	48	38	56	75,70	61,06	BERKEMBANG	BERKEMBANG
6	SUMBAWA	PLAMPANG	5204132010	UPT. PRODE SP III	124	42	69	48	28	57	72,39	58,39	BERKEMBANG	BERKEMBANG
7	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	5204182005	SEBOTOK	122	48	100	58	42	61	83,50	67,35	BERKEMBANG	BERKEMBANG
8	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	5204182007	BUGIS MEDANG	111	71	89	61	43	60	81,24	65,53	BERKEMBANG	BERKEMBANG
9	SUMBAWA	LENANGGUAR	5204272004	TELAGA	141	47	85	41	29	65	81,74	65,93	BERKEMBANG	BERKEMBANG
10	SUMBAWA	ORONG TELU	5204282001	SENAWANG	118	47	80	44	38	56	74,32	59,95	BERKEMBANG	BERKEMBANG
11	SUMBAWA	ORONG TELU	5204282002	KELAWIS	110	72	95	44	35	55	78,95	63,68	BERKEMBANG	BERKEMBANG
12	SUMBAWA	ORONG TELU	5204282003	MUNGKIN	118	58	65	42	28	62	71,70	57,84	BERKEMBANG	BERKEMBANG
13	SUMBAWA	ORONG TELU	5204282004	SEBOK	106	74	75	56	33	57	74,90	60,41	BERKEMBANG	BERKEMBANG

INDEKS DESA STRATA TERTINGGAL TAHUN 2025

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	SKOR DIMENSI						TOTAL SKOR ID	SKOR ID (%)	KELAS SKOR ID (STATUS ID 2025)	STATUS IDM 2024
					LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA				
1	SUMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TERTINGGAL	TERTINGGAL

INDEKS DESA STRATA SANGAT TERTINGGAL TAHUN 2025

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	SKOR DIMENSI						TOTAL SKOR ID	SKOR ID (%)	KELAS SKOR ID (STATUS ID 2025)	STATUS IDM 2024
					LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA				
1	SUMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANGAT TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL

6. REALISASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN 2025

NO	URAIAN	DESA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Total Penyaluran BHPRD Tahun 2025	157 Desa	18.108.413.447	TEREALISASI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72.5 Poin
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja PD	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.32 Poin
3	Meningkatnya cakupan fasilitasi penataan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	16.56 %
4	Meningkatnya kerjasama desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	64.33 %
5	Meningkatnya kualitas administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %
6	Meningkatnya Pendapatan Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	12.68 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,177,414,139.00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,092,400.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,696,189,439.00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,508,000.00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264,613,400.00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,448,000.00	
6	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,562,900.00	
PROGRAM PENATAAN DESA		26,318,000.00	
7	Penyelenggaraan Penataan Desa	26,318,000.00	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		7,371,750.00	
8	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7,371,750.00	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3,862,674,018.00	
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		98,807,700.00	
12	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	98,807,700.00	

Sumbawa Besar, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

MATRIKS HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% REALISASI KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	72.50	64.50	88.97	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	45,508,000	44,308,000	97.36
			Dokumen	3	3	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,508,000	44,308,000	97.36
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja PD	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	80.32	80.40	100.10	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	4,131,906,139	3,982,179,491	96.38
			Dokumen	9	14	155.56	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	36,092,400	35,859,240	99.35
			Dokumen	5	5	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,696,189,439	3,608,864,864	97.64
			Dokumen	4	4	100	Administrasi Umum PD	264,613,400	217,426,730	82.17
			Dokumen	3	3	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,448,000	39,093,200	84.17
			Dokumen	3	3	100	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,562,900	80,935,457	91.39
3	Meningkatnya cakupan fasilitasi penataan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	%	16.56	16.56	100	PROGRAM PENATAAN DESA	26,318,000	24,775,000	94.14
			Desa	4	17	425	Penyelenggaraan Penataan Desa	26,318,000	24,775,000	94.14
4	Meningkatnya kerjasama desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	%	64.33	64.33	100	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	7,371,750	4,491,750	60.93
			Desa	7	7	100	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7,371,750	4,491,750	60.93
5	Meningkatnya kualitas administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	%	100	100	100	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,862,674,018	3,647,396,318	94.43

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% REALISASI KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Desa	157	157	100	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	3,647,396,318	94.43
6	Meningkatnya Pendapatan Desa	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	%	12.68	12.68	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	98,807,700	92,757,100	93.88
			Dokumen	7	7	100	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	98,807,700	92,757,100	93.88

Sumbawa Besar, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,



RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001

MATRIK CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SUMBAWA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah Dana			8,172,585,607	100.00	7,795,907,659	95.39		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dana	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45,508,000	100.00	44,308,000	97.36	64.5 Poin	88.97
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dana	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kapasitas ASN PD	45,508,000	100.00	44,308,000	97.36	3 Dokumen	100.00
2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45,508,000	100.00	44,308,000	97.36	3 Dokumen	100.00
2.13.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Jumlah Dana	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja PD	4,131,906,139	100.00	3,982,179,491	96.38	80.4 Poin	100.10
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dana	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPMD	36,092,400	100.00	35,859,240	99.35	14 Dokumen	155.56
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,238,500	100.00	24,144,340	99.61	2 Dokumen	100.00
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,123,400	100.00	1,117,400	99.47	1 Dokumen	100.00
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,336,400	100.00	1,328,400	99.40	1 Dokumen	100.00
2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	662,000	100.00	656,000	99.09	1 Dokumen	100.00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3,658,500	100.00	3,629,500	99.21	6 Dokumen	600.00
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,890,000	100.00	1,879,000	99.42	1 Laporan	100.00
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,183,600	100.00	3,104,600	97.52	2 Laporan	100.00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan DPMD	3,696,189,439	100.00	3,608,864,864	97.64	5 Dokumen	100.00
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3,631,113,239	100.00	3,545,378,464	97.64	35 Orang/ bulan	100.00
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60,510,000	100.00	59,631,000	98.55	1 Dokumen	100.00
2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,622,650	100.00	1,349,850	83.19	1 Dokumen	100.00
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,443,550	100.00	1,213,550	84.07	1 Laporan	100.00
2.13.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,500,000	100.00	1,292,000	86.13	1 Dokumen	100.00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum PD	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	264,613,400	100.00	217,426,730	82.17	4 Dokumen	100.00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1,310,000	100.00	1,166,000	89.01	1 Paket	100.00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197,247,400	100.00	152,399,000	77.26	14 Paket	140.00
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,288,000	100.00	5,597,000	89.01	12 Laporan	100.00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,768,000	100.00	58,264,730	97.48	12 Laporan	100.00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	46,448,000	100.00	39,093,200	84.17	3 Dokumen	100.00
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,635,000	100.00	1,594,000	97.49	12 Laporan	100.00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,200,000	100.00	33,466,200	83.25	12 Laporan	100.00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,613,000	100.00	4,033,000	87.43	12 Laporan	100.00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	88,562,900	100.00	80,935,457	91.39	3 Dokumen	100.00
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,600,000	100.00	1,337,227	37.15	5 Unit	33.33
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,172,900	100.00	67,683,230	93.78	2 Unit	66.67
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,790,000	100.00	11,915,000	93.16	19 Unit	126.67
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Dana	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	Meningkatnya cakupan fasilitas penataan Desa	26,318,000	100.00	24,775,000	94.14	16.56 %	100.00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Dana	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa	Terlaksananya Fasilitas Penataan Desa	26,318,000	100.00	24,775,000	94.14	17 Desa	425.00
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Dana	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	13,860,000	100.00	12,761,000	92.07	13 Desa	650.00
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Dana	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	12,458,000	100.00	12,014,000	96.44	4 Desa	200.00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Dana	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama	Meningkatnya kerjasama desa	7,371,750	100.00	4,491,750	60.93	64.33 %	100.00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dana	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Desa	7,371,750	100.00	4,491,750	60.93	7 Desa	100.00
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	3,137,250	100.00	1,361,250	43.39	1 Dokumen	100.00
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	1,361,250	100.00	1,361,250	100.00	1 Dokumen	100.00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,873,250	100.00	1,769,250	61.58	1 Dokumen	100.00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dana	Persentase fasilitasi tata kelola desa	Meningkatnya kualitas administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	3,862,674,018	100.00	3,647,396,318	94.43	100 %	100.00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dana	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Tata Kelola Pemerintahan Desa	3,862,674,018	100.00	3,647,396,318	94.43	157 Desa	100.00
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16,085,000	100.00	14,837,000	92.24	5 Dokumen	100.00
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	241,451,500	100.00	51,074,500	21.15	50 Dokumen	161.29
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,630,508,368	100.00	2,626,232,368	99.84	2 Dokumen	100.00
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	42,608,000	100.00	42,186,840	99.01	1 Laporan	100.00
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	751,346,200	100.00	746,715,200	99.38	160 Dokumen	101.91
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38,243,500	100.00	29,841,500	78.03	1 Laporan	100.00
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dana	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	92,435,950	100.00	87,120,290	94.25	16 Desa	400.00
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	49,995,500	100.00	49,388,620	98.79	157 Dokumen	100.00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dana	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	Meningkatnya Pendapatan Desa	98,807,700	100.00	92,757,100	93.88	12.68 %	100.00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Dana	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pemberdayaan	Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	98,807,700	100.00	92,757,100	93.88	7 Dokumen	100.00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87,410,200	100.00	83,103,600	95.07	52 Dokumen	742.86

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah Dana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2,985,250	100.00	1,361,250	45.60	7 Dokumen	100.00
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah Dana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8,412,250	100.00	8,292,250	98.57	2 Laporan	66.67

Sumbawa Besar, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,



RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD					APBN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	72.50	23.07	23.07	23.07	30.78	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	45,508,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,008,000.00					
		Dokumen	3	23.07	23.07	23.07	30.78	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,508,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,008,000.00					
		Dokumen	3	23.07	23.07	23.07	30.78	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45,508,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,008,000.00					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	80.32	30.29	28.04	19.21	22.46	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	4,131,906,139	1,251,557,884	1,158,660,028	793,731,568	927,956,659					
		Dokumen	9	6.29	30.08	19.93	43.71	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	36,092,400	2,268,500	10,856,500	7,192,200	15,775,200					
		Dokumen	2	-	29.92	22.40	47.68	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,238,500.00	-	7,252,500.00	5,430,000.00	11,556,000.00					
		Dokumen	1	94.22	-	5.78	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,123,400.00	1,058,500.00	-	64,900.00	-					
		Dokumen	1	0.00	49.04	50.96	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1,336,400.00	-	655,400.00	681,000.00	-					
		Dokumen	1	100.00	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	662,000.00	662,000.00	-	-	-					
		Dokumen	1	-	-	27.78	72.22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3,658,500.00	-	-	1,016,300.00	2,642,200.00					
		Laporan	1	28.99	71.01	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,890,000.00	548,000.00	1,342,000.00	-	-					
		Laporan	2	-	50.46	-	49.54	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,183,600.00	-	1,606,600.00	-	1,577,000.00					
		Dokumen	5	31.12	27.91	20.05	20.92	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,696,189,439.00	1,150,410,159	1,031,428,303	741,261,143	773,089,834					
		Orang/ bulan	35	31.25	27.97	19.95	20.84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,631,113,239.00	1,134,545,159.00	1,015,441,653.00	724,300,143.00	756,826,284.00					
		Dokumen	1	26.22	23.74	27.04	23.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,510,000.00	15,865,000.00	14,364,000.00	16,361,000.00	13,920,000.00					
		Dokumen	1	-	100.00	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,622,650.00	-	1,622,650.00	-	-					
		Laporan	1	-	-	-	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,443,550.00	-	-	-	1,443,550.00					
		Dokumen	1	-	-	40.00	60.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,500,000.00	-	-	600,000.00	900,000.00					
		Dokumen	4	27.07	32.59	1.16	39.17	Administrasi Umum PD	264,613,400.00	71,636,000	86,247,000	3,082,000	103,648,400					
		Paket	1	-	-	100.00	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,310,000.00	-	-	1,310,000.00	-					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD					APBN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
		Paket	10	28.80	34.74	-	36.47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197,247,400.00	56,800,000.00	68,514,000.00	-	71,933,400.00					
		Laporan	12	25.00	25.00	25.00	25.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,288,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00					
		Laporan	12	22.19	27.04	0.33	50.43	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,768,000.00	13,264,000.00	16,161,000.00	200,000.00	30,143,000.00					
		Dokumen	3	21.64	25.16	31.57	21.64	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,448,000.00	10,050,000	11,685,000	14,663,000	10,050,000					
		Laporan	12	-	100.00	-	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,635,000.00	-	1,635,000.00	-	-					
		Laporan	12	25.00	25.00	25.00	25.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,200,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00					
		Laporan	12	-	-	100.00	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,613,000.00	-	-	4,613,000.00	-					
		Dokumen	3	19.41	20.83	31.09	28.67	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,562,900.00	17,193,225	18,443,225	27,533,225	25,393,225					
		Unit	15	-	-	-	100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,600,000.00	-	-	-	3,600,000.00					
		Unit	3	23.27	23.27	23.27	30.20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,172,900.00	16,793,225.00	16,793,225.00	16,793,225.00	21,793,225.00					
		Unit	15	3.13	12.90	83.97	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,790,000.00	400,000.00	1,650,000.00	10,740,000.00	-					
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	%	16.56	6.22	93.78	-	-	PROGRAM PENATAAN DESA	26,318,000.00	1,638,000	24,680,000	-	-					
		Desa	4	6.22	93.78	-	-	Penyelenggaraan Penataan Desa	26,318,000.00	1,638,000	24,680,000	-	-					
		Desa	2	9.29	90.71	-	-	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	13,860,000.00	1,288,000.00	12,572,000.00	-	-					
		Desa	2	2.81	97.19	-	-	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	12,458,000.00	350,000.00	12,108,000.00	-	-					
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	%	64.33	51.01	9.92	-	39.07	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	7,371,750.00	3,760,500	731,250	-	2,880,000					
		Desa	7	51.01	9.92	-	39.07	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7,371,750.00	3,760,500	731,250	-	2,880,000					
		Dokumen	1	39.21	4.18	-	56.61	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	3,137,250.00	1,230,000.00	131,250.00	-	1,776,000.00					
		Dokumen	1	55.92	44.08	-	-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	1,361,250.00	761,250.00	600,000.00	-	-					
		Dokumen	1	61.58	-	-	38.42	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,873,250.00	1,769,250.00	-	-	1,104,000.00					
	Persentase fasilitasi tata kelola desa	%	100	22.63	24.06	23.61	29.70	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,862,674,018.00	874,129,544	929,226,733	911,961,817	1,147,355,924					
		Desa	157	22.63	24.06	23.61	29.70	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018.00	874,129,544	929,226,733	911,961,817	1,147,355,924					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD					APBN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
		Dokumen	5	-	61.83	38.17	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	16,085,000.00	-	9,945,000.00	6,140,000.00	-					
		Dokumen	31	8.41	7.73	6.46	77.40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	241,451,500.00	20,305,500.00	18,660,000.00	15,600,000.00	186,886,000.00					
		Dokumen	2	24.71	25.74	25.17	24.37	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,630,508,368.00	649,980,544.00	677,189,000.00	662,207,600.00	641,131,224.00					
		Laporan	1	31.94	-	-	68.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	42,608,000.00	13,608,000.00	-	-	29,000,000.00					
		Dokumen	157	22.97	23.55	23.19	30.29	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	751,346,200.00	172,601,000.00	176,945,000.00	174,200,000.00	227,600,200.00					
		Laporan	1	-	-	35.57	64.43	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38,243,500.00	-	-	13,605,000.00	24,638,500.00					
		Desa	4	1.84	18.61	38.33	41.22	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	92,435,950.00	1,704,000.00	17,203,950.00	35,428,000.00	38,100,000.00					
		Dokumen	157	31.86	58.57	9.56	0.00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	49,995,500.00	15,930,500.00	29,283,783.00	4,781,217.00	-					
Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	%	12.68	7.83	23.81	6.95	61.40	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	98,807,700.00	7,738,500	23,530,000	6,870,000	60,669,200					
		Dokumen	7	7.83	23.81	6.95	61.40	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	98,807,700.00	7,738,500	23,530,000	6,870,000	60,669,200					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD					APBN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
		Dokumen	7	6.62	19.67	5.57	68.14	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87,410,200.00	5,785,000.00	17,190,000.00	4,870,000.00	59,565,200.00					
		Dokumen	7	25.50	37.52	-	36.98	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	2,985,250.00	761,250.00	1,120,000.00	-	1,104,000.00					
		Laporan	3	14.17	62.05	23.77	0.00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	8,412,250.00	1,192,250.00	5,220,000.00	2,000,000.00	-					

Sumbawa Besar, Maret 2026



Pt: Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001

Lampiran 8 : Format Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

REKAPITULASI CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA															
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72.5 Poin	23.07	98.10%	4.25%	23.07	92.38%	4.00%	23.07	98.10%	4.25%	30.78	100.00%	3.25%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.32 Poin	30.29	77.72%	2.57%	28.04	82.63%	2.95%	19.21	113.59%	5.91%	22.46	124.96%	5.56%
3	Meningkatnya cakupan fasilitasi penataan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	16.56 %	6.22	0.00%	0.00%	93.78	36.97%	0.39%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	Meningkatnya kerjasama desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	64.33 %	51.01	0.00%	0.00%	9.92	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	39.07	0.00%	0.00%
5	Meningkatnya kualitas administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %	22.63	19.56%	0.86%	24.06	161.89%	6.73%	23.61	97.63%	4.14%	29.70	94.28%	3.17%
6	Meningkatnya Pendapatan Desa	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	12.68 %	7.83	0.00%	0.00%	23.81	86.01%	3.61%	6.95	112.45%	16.17%	61.40	106.80%	1.74%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,508,000	10,500,000	10,300,000	98.10%	10,500,000	9,700,000	92.38%	10,500,000	10,300,000	98.10%	14,008,000	14,008,000	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,508,000	10,500,000	10,300,000	98.10%	10,500,000	9,700,000	92.38%	10,500,000	10,300,000	98.10%	14,008,000	14,008,000	100.00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45,508,000	10,500,000	10,300,000	98.10%	10,500,000	9,700,000	92.38%	10,500,000	10,300,000	98.10%	14,008,000	14,008,000	100.00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,131,906,139	1,251,557,884	972,681,365	77.72%	1,158,660,028	957,395,928	82.63%	793,731,568	901,616,923	113.59%	927,956,659	1,159,610,275	124.96%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,092,400	2,268,500	-	0.00%	10,856,500	3,486,000	32.11%	7,192,200	10,784,200	149.94%	15,775,200	21,589,040	136.85%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,238,500	-	-	0.00%	7,252,500	3,486,000	48.07%	5,430,000	3,448,500	63.51%	11,556,000	17,209,840	148.93%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,123,400	1,058,500	-	0.00%	-	-	0.00%	64,900	1,117,400	1721.73%	-	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1,336,400	-	-	0.00%	655,400	-	0.00%	681,000	1,328,400	195.07%	-	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	662,000	662,000	-	0.00%	-	-	0.00%	-	656,000	0.00%	-	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	3,658,500	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1,016,300	1,008,300	99.21%	2,642,200	2,621,200	99.21%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,890,000	548,000	-	0.00%	1,342,000	-	0.00%	-	1,879,000	0.00%	-	-	0.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,183,600	-	-	0.00%	1,606,600	-	0.00%	-	1,346,600	0.00%	1,577,000	1,758,000	111.48%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,696,189,439	1,150,410,159	972,681,365	84.55%	1,031,428,303	898,886,428	87.15%	741,261,143	844,090,744	113.87%	773,089,834	893,206,327	115.54%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,631,113,239	1,134,545,159	960,801,365	84.69%	1,015,441,653	881,661,428	86.83%	724,300,143	828,586,894	114.40%	756,826,284	874,328,777	115.53%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,510,000	15,865,000	11,880,000	74.88%	14,364,000	17,225,000	119.92%	16,361,000	13,558,000	82.87%	13,920,000	16,968,000	121.90%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,622,650	-	-	0.00%	1,622,650	-	0.00%	-	1,349,850	0.00%	-	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,443,550	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1,443,550	1,213,550	84.07%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,500,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	600,000	596,000	99.33%	900,000	696,000	77.33%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	264,613,400	71,636,000	-	0.00%	86,247,000	23,073,000	26.75%	3,082,000	16,452,429	533.82%	103,648,400	177,901,301	171.64%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,310,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1,310,000	-	0.00%	-	1,166,000	0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197,247,400	56,800,000	-	0.00%	68,514,000	7,700,000	11.24%	-	1,500,000	0.00%	71,933,400	143,199,000	199.07%
Fasilitas Kunjungan Tamu	6,288,000	1,572,000	-	0.00%	1,572,000	917,000	58.33%	1,572,000	-	0.00%	1,572,000	4,680,000	297.71%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,768,000	13,264,000	-	0.00%	16,161,000	14,456,000	89.45%	200,000	14,952,429	7476.21%	30,143,000	28,856,301	95.73%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,448,000	10,050,000	-	0.00%	11,685,000	8,025,500	68.68%	14,663,000	7,951,550	54.23%	10,050,000	23,116,150	230.01%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,635,000	-	-	0.00%	1,635,000	-	0.00%	-	1,594,000	0.00%	-	-	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,200,000	10,050,000	-	0.00%	10,050,000	8,025,500	79.86%	10,050,000	6,357,550	63.26%	10,050,000	19,083,150	189.88%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,613,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4,613,000	-	0.00%	-	4,033,000	0.00%
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,562,900	17,193,225	-	0.00%	18,443,225	14,800,000	80.25%	27,533,225	22,338,000	81.13%	25,393,225	43,797,457	172.48%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,600,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	3,600,000	1,337,227	37.15%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,172,900	16,793,225	-	0.00%	16,793,225	13,340,000	79.44%	16,793,225	20,148,000	119.98%	21,793,225	34,195,230	156.91%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,790,000	400,000	-	0.00%	1,650,000	1,460,000	88.48%	10,740,000	2,190,000	20.39%	-	8,265,000	0.00%

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENATAAN DESA		26,318,000	1,638,000	-	0.00%	24,680,000	9,125,000	36.97%	-	7,584,000	0.00%	-	8,066,000	0.00%
	Penyelenggaraan Penataan Desa	26,318,000	1,638,000	-	0.00%	24,680,000	9,125,000	36.97%	-	7,584,000	0.00%	-	8,066,000	0.00%
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	13,860,000	1,288,000	-	0.00%	12,572,000	6,240,000	49.63%	-	3,660,000	0.00%	-	2,861,000	0.00%
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	12,458,000	350,000	-	0.00%	12,108,000	2,885,000	23.83%	-	3,924,000	0.00%	-	5,205,000	0.00%
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		7,371,750	3,760,500	-	0.00%	731,250	-	0.00%	-	4,491,750	0.00%	2,880,000	-	0.00%
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7,371,750	3,760,500	-	0.00%	731,250	-	0.00%	-	4,491,750	0.00%	2,880,000	-	0.00%
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3,137,250	1,230,000	-	0.00%	131,250	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	1,776,000	-	0.00%
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1,361,250	761,250	-	0.00%	600,000	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	-	-	0.00%
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,873,250	1,769,250	-	0.00%	-	-	0.00%	-	1,769,250	0.00%	1,104,000	-	0.00%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3,862,674,018	874,129,544	171,000,000	19.56%	929,226,733	1,504,320,420	161.89%	911,961,817	890,370,072	97.63%	1,147,355,924	1,081,705,826	94.28%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	874,129,544	171,000,000	19.56%	929,226,733	1,504,320,420	161.89%	911,961,817	890,370,072	97.63%	1,147,355,924	1,081,705,826	94.28%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16,085,000	-	-	0.00%	9,945,000	-	0.00%	6,140,000	6,487,000	105.65%	-	8,350,000	0.00%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	241,451,500	20,305,500	-	0.00%	18,660,000	-	0.00%	15,600,000	23,400,000	150.00%	186,886,000	27,674,500	14.81%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,630,508,368	649,980,544	-	0.00%	677,189,000	1,311,014,920	193.60%	662,207,600	654,850,392	98.89%	641,131,224	660,367,056	103.00%
	Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	42,608,000	13,608,000	-	0.00%	-	5,360,000	0.00%	-	4,870,000	0.00%	29,000,000	31,956,840	110.20%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	751,346,200	172,601,000	171,000,000	99.07%	176,945,000	171,000,000	96.64%	174,200,000	171,476,000	98.44%	227,600,200	233,239,200	102.48%
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38,243,500	-	-	0.00%	-	-	0.00%	13,605,000	-	0.00%	24,638,500	29,841,500	121.12%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	92,435,950	1,704,000	-	0.00%	17,203,950	4,065,000	23.63%	35,428,000	11,028,560	31.13%	38,100,000	72,026,730	189.05%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	49,995,500	15,930,500	-	0.00%	29,283,783	12,880,500	43.99%	4,781,217	18,258,120	381.87%	-	18,250,000	0.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		98,807,700	7,738,500	-	0.00%	23,530,000	20,238,100	86.01%	6,870,000	7,725,500	112.45%	60,669,200	64,793,500	106.80%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	98,807,700	7,738,500	-	0.00%	23,530,000	20,238,100	86.01%	6,870,000	7,725,500	112.45%	60,669,200	64,793,500	106.80%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87,410,200	5,785,000	-	0.00%	17,190,000	20,238,100	117.73%	4,870,000	4,222,000	86.69%	59,565,200	58,643,500	98.45%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2,985,250	761,250	-	0.00%	1,120,000	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	1,104,000	-	0.00%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8,412,250	1,192,250	-	0.00%	5,220,000	-	0.00%	2,000,000	2,142,250	107.11%	-	6,150,000	0.00%

Sumbawa Besar, Maret 2026

Pt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,


RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001

Lampiran 8 : Format Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

**REKAPITULASI CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA**

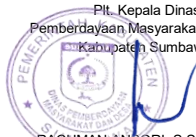
[illegible]

[illegible]

PROGRAM / RANGKAIAN AKTIVITAS		ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		7,371,750	3,760,500	-	0.00%	731,250	-	0.00%	-	4,491,750	0.00%	2,880,000	-	0.00%
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7,371,750	3,760,500	-	0.00%	731,250	-	0.00%	-	4,491,750	0.00%	2,880,000	-	0.00%
	- Rekapitulasi dan susun Laporan Sub Kegiatan, Paraf Usulan oleh Kabid, Sekdis, Persetujuan Pimpinan, Kirim Laporan ke Pengguna, & Arsipkan													
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3,137,250	1,230,000	-	0.00%	131,250	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	1,776,000	-	0.00%
	- Rekap Usulan dari Desa, Koordinasi dengan Pimpinan, fasilitasi Rapat antar desa yang bekerjasama, Sosialisasi ke desa tentang proses, buat berita acara, terima laporan dari desa, arsipkan semua dokumen kerjasama antar desa dari desa.													
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1,361,250	761,250	-	0.00%	600,000	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	-	-	0.00%
	- Rekap Usulan dari Desa/Pihak ketiga, Koordinasi dengan Pimpinan, Rapat Awal, Sosialisasi ke desa bersama Pihak ketiga tentang proses, buat berita acara, terima laporan, arsipkan semua dokumen kerjasama antar desa dari desa/pihak ketiga.													
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,873,250	1,769,250	-	0.00%	-	-	0.00%	-	1,769,250	0.00%	1,104,000	-	0.00%
	- Identifikasi Program dan wilayah PKP, koordinasi dengan desa, bentuk Pengurus, lakkan pendampingan dan laporan perkembangan PKP ke Kepala Daerah, Pemprop dan Pusat, movev perkembangan Program PKP, Buat Laporan subkegiatan													
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3,862,674,018	874,129,544	171,000,000	19.56%	929,226,733	1,504,320,420	161.89%	911,961,817	890,370,072	97.63%	1,147,355,924	1,081,705,826	94.28%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	874,129,544	171,000,000	19.56%	929,226,733	1,504,320,420	161.89%	911,961,817	890,370,072	97.63%	1,147,355,924	1,081,705,826	94.28%
	- Rekapitulasi dan menyusun Laporan Sub Kegiatan													
	- terbitkan dok Laporan, Paraf, Persetujuan Pimpinan													
	- Kirim laporan ke Bupati/Sekda, & Arsipkan													
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16,085,000	-	-	0.00%	9,945,000	-	0.00%	6,140,000	6,487,000	105.65%	-	8,350,000	0.00%
	- Pendampingan penyusunan Administrasi Pemerintahan Desa													
	- Menyesuaikan administrasi pemdes dengan aturan yg berlaku													
	- Finalisasi (dilanjutkan/revisi), selesai													
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	241,451,500	20,305,500	-	0.00%	18,660,000	-	0.00%	15,600,000	23,400,000	150.00%	186,886,000	27,674,500	14.81%
	- Sosialisasi/koordinasi penyusunan produk hukum di desa													
	- Mengacu kepada aturan yg lebih tinggi.													
	- Draft usulan disampaikan ke Pemerintah daerah tuk diregister													
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,630,508,368	649,980,544	-	0.00%	677,189,000	1,311,014,920	193.60%	662,207,600	654,850,392	98.89%	641,131,224	660,367,056	103.00%
	- Menerbitkan Perbup Pedoman penyusunan APBDes/ Perubahan													
	- Penyusunan APBDes diparaf jika ada rekomendasi camat													
	- lengkapi semua dok. bagian dari syarat pencairan APBDes													
	Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	42,608,000	13,608,000	-	0.00%	-	5,360,000	0.00%	-	4,870,000	0.00%	29,000,000	31,956,840	110.20%
	- Koordinasi proses pelaksanaan Musyawarah Desa berdasarkan regulasi Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa dan Permdes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	- Memastikan laporan hasil pelaksanaan Musyawarah Desa dalam bentuk berita acara hasil pelaksanaan Musyawarah Desa													
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	751,346,200	172,601,000	171,000,000	99.07%	176,945,000	171,000,000	96.64%	174,200,000	171,476,000	98.44%	227,600,200	233,239,200	102.48%
	- Pembinaan BUMDES, identifikasi Masalah, koordinasikan ke desa, Rapat Koordinasi tingkat kabupaten dan desa, selesai.													
	- jika lanjut koordinasi sesuai masalah, libatkan semua pihak sesuai masalah													
	- Buat Laporan hasil pembinaan BUMDes													
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38,243,500	-	-	0.00%	-	-	0.00%	13,605,000	-	0.00%	24,638,500	29,841,500	121.12%

PROGRAM / RANGKAIAN AKTIVITAS		ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	92,435,950	1,704,000	-		17,203,950	4,065,000		35,428,000	11,028,560		38,100,000	72,026,730	
	- Rekapitulasi Usulan Proposal dari Desa, Koordinasi dengan Pimpinan, Pembentukan TIM & Rapat TIM, Tentukan lokasi, Koordinasi ke desa lokasi yg disetujui, sosialisasi proses oleh TIM, lanjutkan proses Penetapan dan Penegasan batas desa oleh TIM, laporkan hasil kegiatan dan buat Ranperbup, usulkan Ranperbup													
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	49,995,500	15,930,500	-		29,283,783	12,880,500		4,781,217	18,258,120		-	18,250,000	
	- Sosialisasi persiapan pelaksanaan Lomba Desa													
	- Pengisian syarat-syarat berupa data kebutuhan Lomba Desa pada aplikasi EVDESKEL													
	- Pelaksanaan, Penilaian dan Pembagian reward pada Desa yang menjadi pemenang													
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		98,807,700	7,738,500	-	0.00%	23,530,000	20,238,100	86.01%	6,870,000	7,725,500	112.45%	60,669,200	64,793,500	106.80%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	98,807,700	7,738,500	-	0.00%	23,530,000	20,238,100	86.01%	6,870,000	7,725,500	112.45%	60,669,200	64,793,500	106.80%
	- Rekapitulasi dan menyusun Laporan Sub Kegiatan													
	- terbitkan dok Laporan, Paraf, Persetujuan Pimpinan													
	- Kirim laporan ke Bupati/Sekda, & Arsipkan													
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87,410,200	5,785,000	-	0.00%	17,190,000	20,238,100	117.73%	4,870,000	4,222,000	86.69%	59,565,200	58,643,500	98.45%
	- rekap/identifikasi posyandu yg ingin di bina													
	- pembinaan dan perlombaan posyandu													
	- perbaiki administrasi, bina terus dan umumkan pemenang													
	- bagi hadiah, bina pemenang tuk lomba propinsi													
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2,985,250	761,250	-	0.00%	1,120,000	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	1,104,000	-	0.00%
	- Sosialisasi usaha ekonomi yang berpostensi d kembangkan													
	- rekap desa & jenis usaha ekonomi yang dikembangkan													
	- laporkan hasil pelaksanaan sub kegiatan													
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8,412,250	1,192,250	-	0.00%	5,220,000	-	0.00%	2,000,000	2,142,250	107.11%	-	6,150,000	0.00%
	- sosialisasi / penjaringan TTG, interpretasi hasil temuan, seleksi dan perlombakan temuan TTG di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat jika tetap lolos, Bina dan laporkan hasil pelaksanaan sub kegiatan													

Sumbawa Besar, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001

Lampiran 8 : Format Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

**REKAPITULASI CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA**

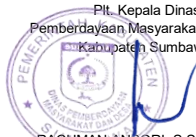
[illegible]

[illegible]

PROGRAM / RANGKAIAN AKTIVITAS		ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		7,371,750	3,760,500	-	0.00%	731,250	-	0.00%	-	4,491,750	0.00%	2,880,000	-	0.00%
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7,371,750	3,760,500	-	0.00%	731,250	-	0.00%	-	4,491,750	0.00%	2,880,000	-	0.00%
	- Rekapitulasi dan susun Laporan Sub Kegiatan, Paraf Usulan oleh Kabid, Sekdis, Persetujuan Pimpinan, Kirim Laporan ke Pengguna, & Arsipkan													
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3,137,250	1,230,000	-	0.00%	131,250	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	1,776,000	-	0.00%
	- Rekap Usulan dari Desa, Koordinasi dengan Pimpinan, fasilitasi Rapat antar desa yang bekerjasama, Sosialisasi ke desa tentang proses, buat berita acara, terima laporan dari desa, arsipkan semua dokumen kerjasama antar desa dari desa.													
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1,361,250	761,250	-	0.00%	600,000	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	-	-	0.00%
	- Rekap Usulan dari Desa/Pihak ketiga, Koordinasi dengan Pimpinan, Rapat Awal, Sosialisasi ke desa bersama Pihak ketiga tentang proses, buat berita acara, terima laporan, arsipkan semua dokumen kerjasama antar desa dari desa/pihak ketiga.													
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,873,250	1,769,250	-	0.00%	-	-	0.00%	-	1,769,250	0.00%	1,104,000	-	0.00%
	- Identifikasi Program dan wilayah PKP, koordinasi dengan desa, bentuk Pengurus, lakkan pendampingan dan laporan perkembangan PKP ke Kepala Daerah, Pemprop dan Pusat, movev perkembangan Program PKP, Buat Laporan subkegiatan													
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3,862,674,018	874,129,544	171,000,000	19.56%	929,226,733	1,504,320,420	161.89%	911,961,817	890,370,072	97.63%	1,147,355,924	1,081,705,826	94.28%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	874,129,544	171,000,000	19.56%	929,226,733	1,504,320,420	161.89%	911,961,817	890,370,072	97.63%	1,147,355,924	1,081,705,826	94.28%
	- Rekapitulasi dan menyusun Laporan Sub Kegiatan													
	- terbitkan dok Laporan, Paraf, Persetujuan Pimpinan													
	- Kirim laporan ke Bupati/Sekda, & Arsipkan													
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16,085,000	-	-	0.00%	9,945,000	-	0.00%	6,140,000	6,487,000	105.65%	-	8,350,000	0.00%
	- Pendampingan penyusunan Administrasi Pemerintahan Desa													
	- Menyesuaikan administrasi pemdes dengan aturan yg berlaku													
	- Finalisasi (dilanjutkan/revisi), selesai													
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	241,451,500	20,305,500	-	0.00%	18,660,000	-	0.00%	15,600,000	23,400,000	150.00%	186,886,000	27,674,500	14.81%
	- Sosialisasi/koordinasi penyusunan produk hukum di desa													
	- Mengacu kepada aturan yg lebih tinggi.													
	- Draft usulan disampaikan ke Pemerintah daerah tuk diregister													
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,630,508,368	649,980,544	-	0.00%	677,189,000	1,311,014,920	193.60%	662,207,600	654,850,392	98.89%	641,131,224	660,367,056	103.00%
	- Menerbitkan Perbup Pedoman penyusunan APBDes/ Perubahan													
	- Penyusunan APBDes diparaf jika ada rekomendasi camat													
	- lengkapi semua dok. bagian dari syarat pencairan APBDes													
	Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	42,608,000	13,608,000	-	0.00%	-	5,360,000	0.00%	-	4,870,000	0.00%	29,000,000	31,956,840	110.20%
	- Koordinasi proses pelaksanaan Musyawarah Desa berdasarkan regulasi Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa dan Permdes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	- Memastikan laporan hasil pelaksanaan Musyawarah Desa dalam bentuk berita acara hasil pelaksanaan Musyawarah Desa													
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	751,346,200	172,601,000	171,000,000	99.07%	176,945,000	171,000,000	96.64%	174,200,000	171,476,000	98.44%	227,600,200	233,239,200	102.48%
	- Pembinaan BUMDES, identifikasi Masalah, koordinasikan ke desa, Rapat Koordinasi tingkat kabupaten dan desa, selesai.													
	- jika lanjut koordinasi sesuai masalah, libatkan semua pihak sesuai masalah													
	- Buat Laporan hasil pembinaan BUMDes													
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38,243,500	-	-	0.00%	-	-	0.00%	13,605,000	-	0.00%	24,638,500	29,841,500	121.12%

PROGRAM / RANGKAIAN AKTIVITAS		ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	92,435,950	1,704,000	-		17,203,950	4,065,000		35,428,000	11,028,560		38,100,000	72,026,730	
	- Rekapitulasi Usulan Proposal dari Desa, Koordinasi dengan Pimpinan, Pembentukan TIM & Rapat TIM, Tentukan lokasi, Koordinasi ke desa lokasi yg disetujui, sosialisasi proses oleh TIM, lanjutkan proses Penetapan dan Penegasan batas desa oleh TIM, laporkan hasil kegiatan dan buat Ranperbup, usulkan Ranperbup													
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	49,995,500	15,930,500	-		29,283,783	12,880,500		4,781,217	18,258,120		-	18,250,000	
	- Sosialisasi persiapan pelaksanaan Lomba Desa													
	- Pengisian syarat-syarat berupa data kebutuhan Lomba Desa pada aplikasi EVDESKEL													
	- Pelaksanaan, Penilaian dan Pembagian reward pada Desa yang menjadi pemenang													
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		98,807,700	7,738,500	-	0.00%	23,530,000	20,238,100	86.01%	6,870,000	7,725,500	112.45%	60,669,200	64,793,500	106.80%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	98,807,700	7,738,500	-	0.00%	23,530,000	20,238,100	86.01%	6,870,000	7,725,500	112.45%	60,669,200	64,793,500	106.80%
	- Rekapitulasi dan menyusun Laporan Sub Kegiatan													
	- terbitkan dok Laporan, Paraf, Persetujuan Pimpinan													
	- Kirim laporan ke Bupati/Sekda, & Arsipkan													
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87,410,200	5,785,000	-	0.00%	17,190,000	20,238,100	117.73%	4,870,000	4,222,000	86.69%	59,565,200	58,643,500	98.45%
	- rekap/identifikasi posyandu yg ingin di bina													
	- pembinaan dan perlombaan posyandu													
	- perbaikan administrasi, bina terus dan umumkan pemenang													
	- bagi hadiah, bina pemenang tuk lomba propinsi													
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2,985,250	761,250	-	0.00%	1,120,000	-	0.00%	-	1,361,250	0.00%	1,104,000	-	0.00%
	- Sosialisasi usaha ekonomi yang berpostensi d kembangkan													
	- rekap desa & jenis usaha ekonomi yang dikembangkan													
	- laporkan hasil pelaksanaan sub kegiatan													
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8,412,250	1,192,250	-	0.00%	5,220,000	-	0.00%	2,000,000	2,142,250	107.11%	-	6,150,000	0.00%
	- sosialisasi / penjaringan TTG, interpretasi hasil temuan, seleksi dan perlombakan temuan TTG di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat jika tetap lolos, Bina dan laporkan hasil pelaksanaan sub kegiatan													

Sumbawa Besar, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Bungur No. 03, ☎️ (0371) 625004/ fax 21503 Sumbawa Besar
Email : dpmd.sbw@gmail.com, Website : www.dpmd.sumbawakab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN I TAHUN 2025

Kegiatan Monev Triwulan I dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus diisi oleh bidang-bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja.

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan I dilaksanakan pada minggu ke III, yaitu tanggal 14-18 April 2025.

Ringkasan hasil kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut:

Progres Laporan Fisik dan keuangan Program dan Kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat per **31 Maret 2025**

**PROGRES LAPORAN FISIK KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI SEKRETARIAT
DAN MASING-MASING BIDANG PER 31 MARET 2025**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW I		FISIK (%)	KET
			ANGGARAN	CAPAIAN		
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,177,414,139	982,981,365	23.53	23.53	
2	Program Penataan Desa	26,318,000	-	-	-	
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	7,371,750	-	-	-	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	171,000,000	4.43	4.43	
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	98,807,700	-	-	-	

Pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2025:

DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN / INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72.50			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
2	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.32			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
3	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	16.56			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
4	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	64.33			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
5	Persentase fasilitasi tata kelola desa	100.00			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
6	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	12.68			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan

Sumbawa Besar, 18 April 2025
Kepala Dinas PMD Kab. Sumbawa


RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Bungur No. 03, ☎ (0371) 625004/ fax 21503 Sumbawa Besar
Email : dpmd.sbw@gmail.com, Website : www.dpmd.sumbawakab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN II TAHUN 2025

Kegiatan Monev Triwulan II dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus diisi oleh bidang-bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja.

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan II dilaksanakan pada minggu ke II, yaitu tanggal 7-11 Juli 2025.

Ringkasan hasil kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut:

Progres Laporan Fisik dan keuangan Program dan Kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat per **30 Juni 2025**

**PROGRES LAPORAN FISIK KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI SEKRETARIAT
DAN MASING-MASING BIDANG PER 30 JUNI 2025**

N O	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW I		FISIK (%)	KET
			ANGGARAN	CAPAIA N		
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,177,414,139	957,970,928	22.93	22.93	
2	Program Penataan Desa	26,318,000	9,125,000	34.67	34.67	
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	7,371,750	-	-	-	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	1,504,320,420	38.95	38.95	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	98,807,700	20,238,100	20.48	20.48	

Pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2025:

DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN / INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72.50			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
2	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.32			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
3	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	16.56			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
4	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	64.33			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
5	Persentase fasilitasi tata kelola desa	100.00			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
6	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	12.68			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan

Sumbawa Besar, 11 Juli 2025
Kepala Dinas PMD Kab. Sumbawa


RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Bungur No. 03, ☎ (0371) 625004/ fax 21503 Sumbawa Besar
Email : dpmd.sbw@gmail.com, Website : www.dpdmd.sumbawakab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN III TAHUN 2025

Kegiatan Monev Triwulan III dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus diisi oleh bidang-bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja.

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan III dilaksanakan pada minggu ke III, yaitu tanggal 13-17 Oktober 2025.

Ringkasan hasil kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut:

Progres Laporan Fisik dan keuangan Program dan Kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat per **30 September 2025**

**PROGRES LAPORAN FISIK KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI SEKRETARIAT
DAN MASING-MASING BIDANG PER 30 SEPTEMBER 2025**

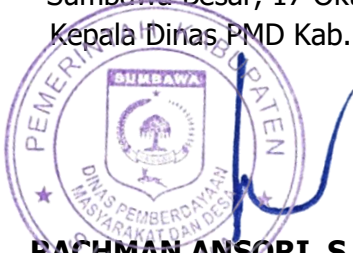
NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW III		FISIK (%)	KET
			ANGGARAN	CAPAIAN		
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,177,414,139	911,916,923	21.83	21.83	
2	Program Penataan Desa	26,318,000	7,584,000	28.82	28.82	
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	7,371,750	4,491,750	60.93	60.93	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	890,370,072	23.05	23.05	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	98,807,700	7,725,500	7.82	7.82	

Pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2025:

DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN / INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72.50			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
2	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.32			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
3	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	16.56			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
4	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	64.33			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
5	Persentase fasilitasi tata kelola desa	100.00			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan
6	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	12.68			Belum ada realisasi karena data tersaji dalam tahunan

Sumbawa Besar, 17 Oktober 2025
Kepala Dinas PMD Kab. Sumbawa


RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Bungur No. 03, ☎ (0371) 625004/ fax 21503 Sumbawa Besar
Email : dpmd.sbw@gmail.com, Website : www.dpdmd.sumbawakab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Kegiatan Monev Triwulan IV dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus diisi oleh bidang-bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja.

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan IV dilaksanakan pada minggu ke I dan Minggu Ke II, yaitu tanggal 1-9 Januari 2026.

Ringkasan hasil kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut:

Progres Laporan Fisik dan keuangan Program dan Kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat per **31 Desember 2025**

**PROGRES LAPORAN FISIK KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI SEKRETARIAT
DAN MASING-MASING BIDANG PER 31 DESEMBER 2025**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW IV		FISIK (%)	KET
			ANGGARAN	CAPAIAN		
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,177,414,139	1,173,618,275	28.09	28.09	
2	Program Penataan Desa	26,318,000	8,066,000	30.65	30.65	
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	7,371,750	-	-	-	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018	1,081,705,826	28.00	28.00	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	98,807,700	64,793,500	65.58	65.58	

Pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2025:

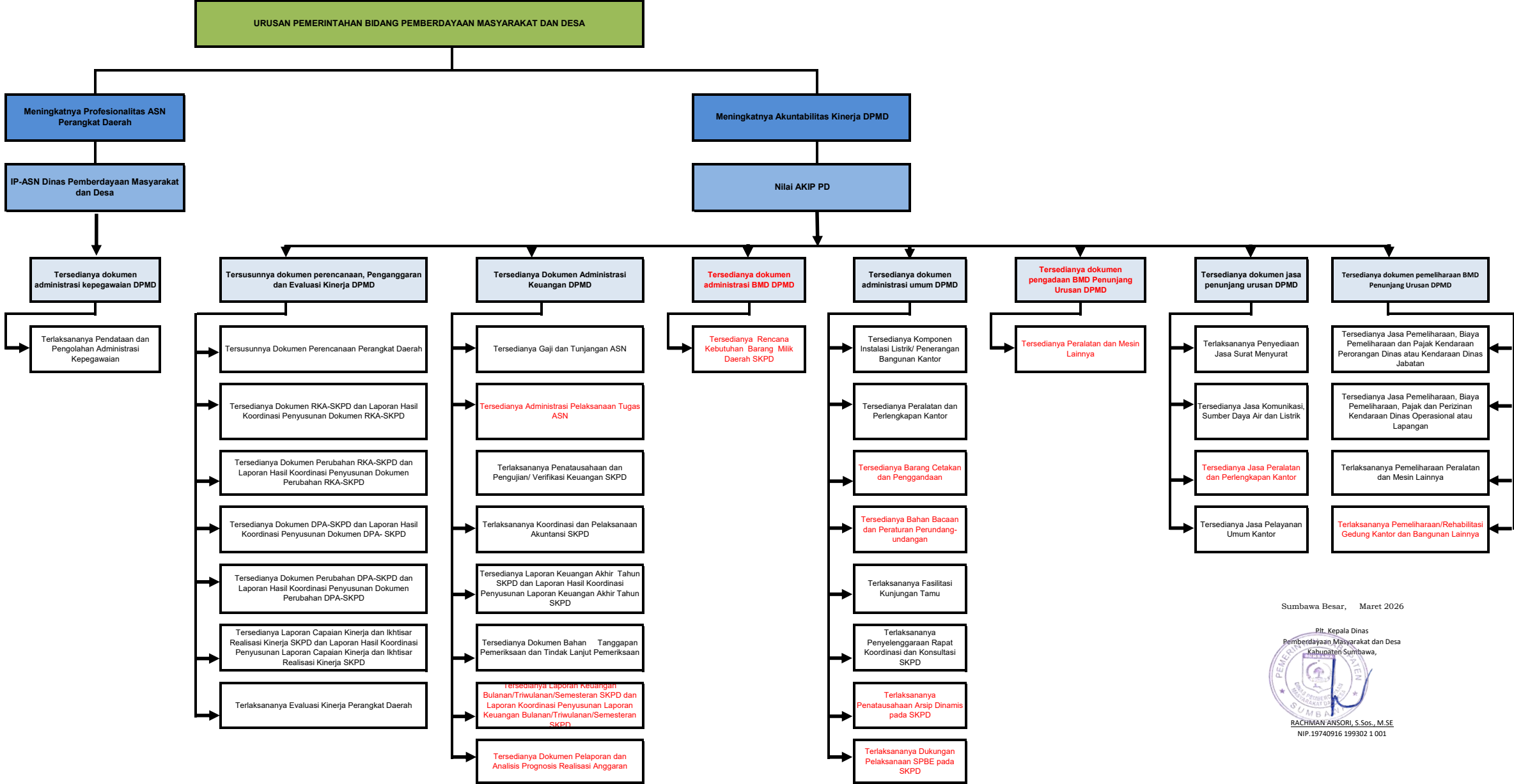
DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN / INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72.50	64.50	88.97	
2	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.32	80.40	100.10	
3	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	16.56	16.56	100.00	
4	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	64.33	64.33	100.00	
5	Persentase fasilitasi tata kelola desa	100.00	100.00	100.00	
6	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	12.68	12.68	100.00	

Sumbawa Besar, 9 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Sumbawa


RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

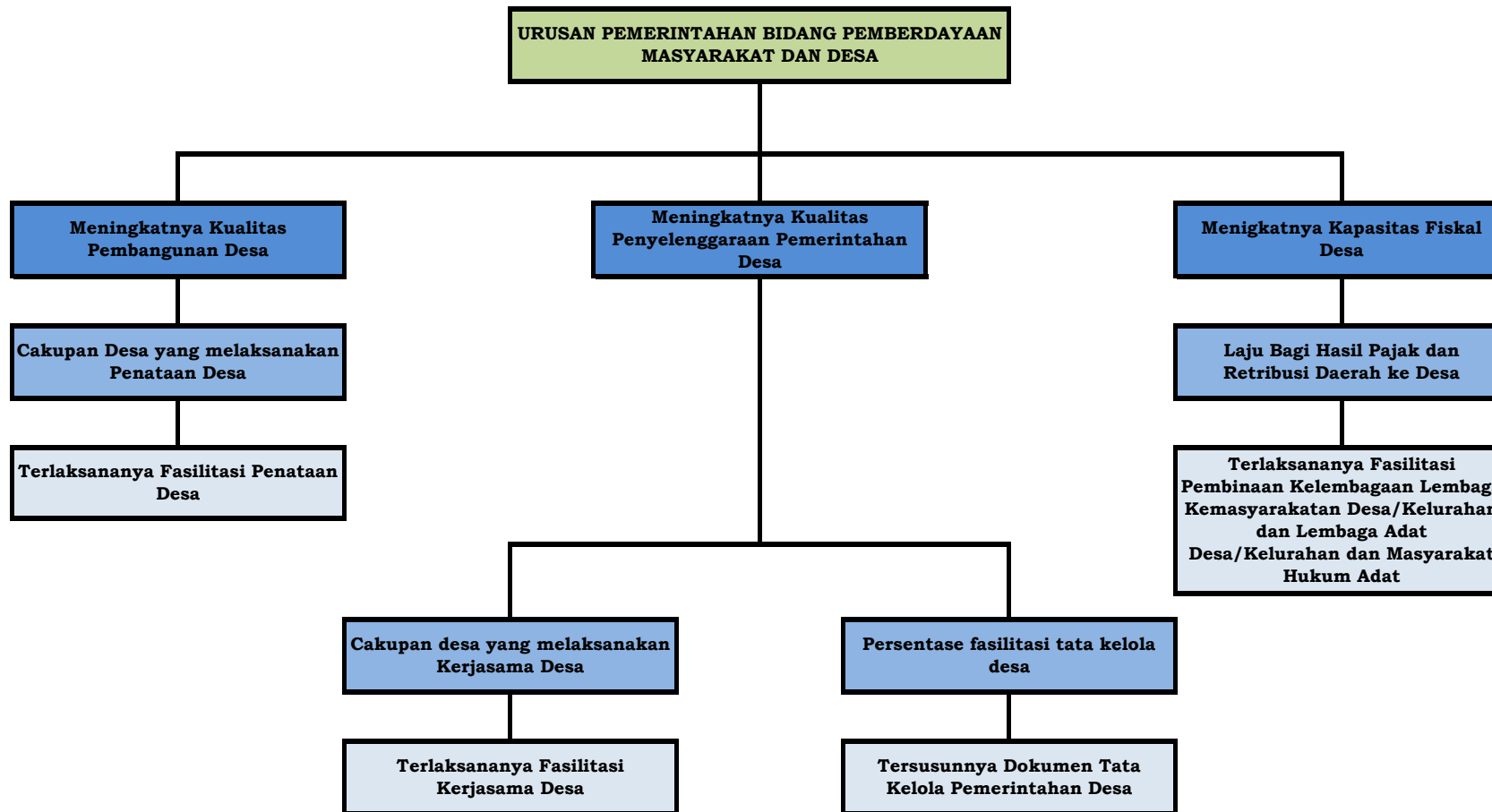
OUTCOME 1



Sumbawa Besar, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001



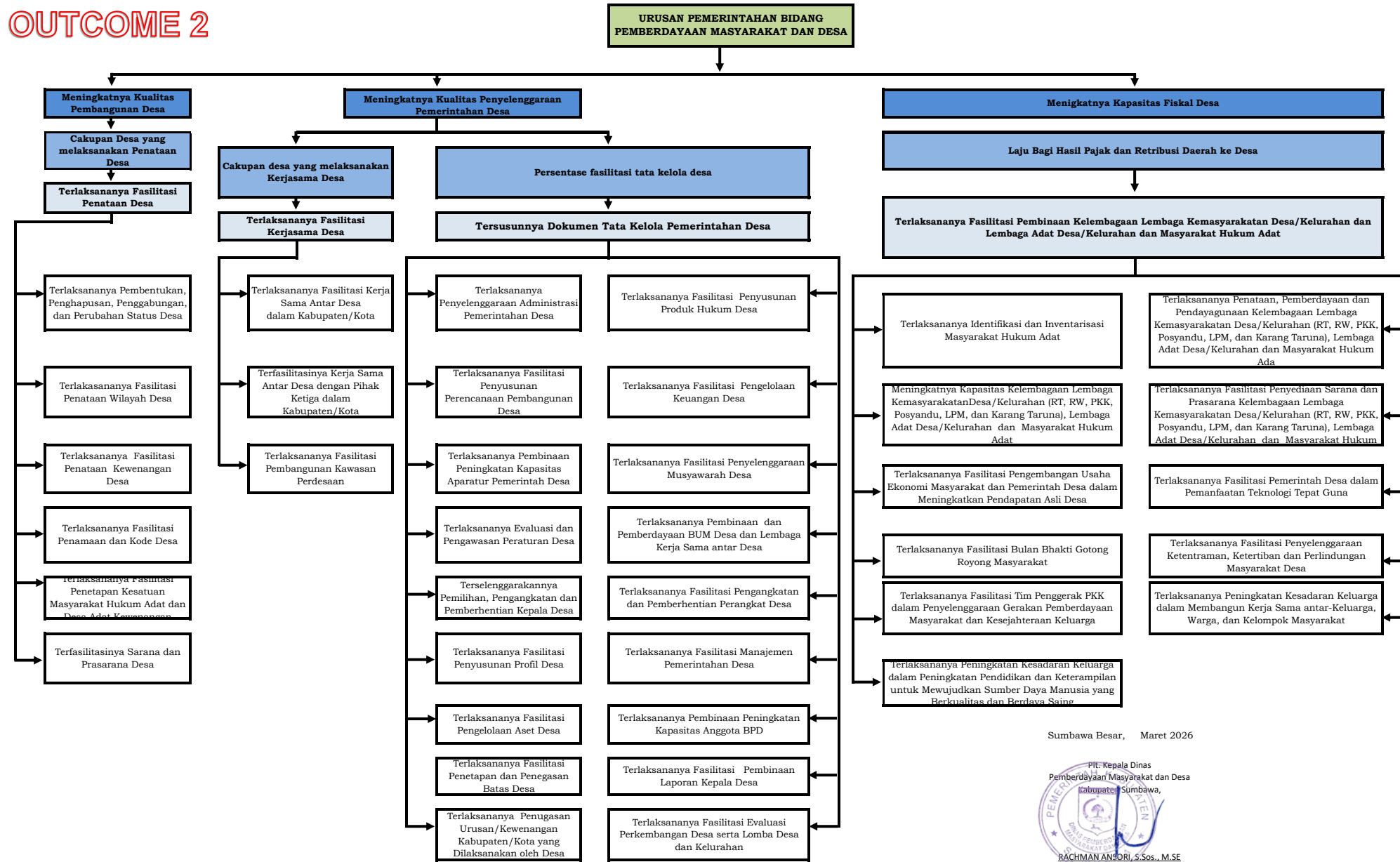
Sumbawa Besar, Maret 2026

Pt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,



RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001

OUTCOME 2



Sumbawa Besar, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,



RACHMAN ANTORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001

ALASAN TERCAPAI /TIDAK PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN									
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
TAHUN 2025									
PD	Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun n (%)	PPTK tahun n	Keterangan terhadap Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran atas tahun n	Capaian Sasaran	Capaian Program	Capaian Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	88,97	KADIS		Tidak Mencapai Target			
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Poin)	88,97	SEKDIS	Masih ada pegawai yang belum melengkapi dokumen pada ASN Digital		Tidak Mencapai Target		
	Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	tenaga non-ASN yang diatur berdasarkan absensi/hari kerja efektif. Adanya hari libur dan cuti bersama yang mengakibatkan alokasi anggaran yang telah disusun tidak dapat diserap maksimal. 2. Terjadi peralihan dari honor daerah menjadi outsouching dikarenakan ada tenaga kebersihan yang lulus PPPK			Mencapai Target	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	tenaga non-ASN yang diatur berdasarkan absensi/hari kerja efektif. Adanya hari libur dan cuti bersama yang mengakibatkan alokasi anggaran yang telah disusun tidak dapat diserap maksimal.2. Terjadi peralihan dari honor daerah menjadi outsoucing dikarenakan ada tenaga kebersihan yang lulus PPPK				Mencapai Target
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Pelayanan Publik	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat	100,00	KADIS	Sosialisasi, pelaksanaan dan pengolahan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terlaksana menggunakan sumber daya yang ada	Mencapai Target			
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0.00	KABID ADPEMDES	Tidak ada anggaran		Tidak Mencapai Target		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0.00	BUPATI					
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD	100,10	KADIS		Mencapai Target			
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP PD	100,10	SEKDIS			Mencapai Target		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	155,56	KASUBBAG RENLAP				Mencapai Target	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	600,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target
	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Kasubbag Renlap					Mencapai Target

	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	100,00	Sekdis				Mencapai Target	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	Sekdis					Mencapai Target
	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN				Mencapai Target	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	kegiatan ini : 1. Salah satu item belanja modal tidak dapat dieksekusi karena pagu di DPA lebih rendah dibandingkan harga pasar rill saat pengadaan. 2. Penambahan anggaran pada DPA Perubahan berhasil meningkatkan volume pengadaan, namun tidak dibarengi dengan penyesuaian target pada dokumen				Mencapai Target
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Adanya efisiensi biaya perjalanan dinas yakni pemilihan biaya penginapan yang lebih rendah atau biaya transpotasi yang digunakan lebih rendah (Lumsum vs Rill).				Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN				Mencapai Target	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Adanya kebijakan internal penghematan energi misalnya : mematikan AC dan lampu setelah jam kerja, menggunakan air secukupnya yang berhasil menekan tagihan atau pemakain bulanan.				Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Terdapat perbedaan harga barang pada DPA dengan harga rill pada e-prchasing (E-catalog). Meskipun masih tedapat sisa dana, volume yangdibeli sudah sesuai dengan kebutuhan teknis yang direncanakan.				Mencapai Target

	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	100,00	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN				Mencapai Target	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33,33	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	kendala utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dancapaian fisik : 1. Kendala Prosedur Pembayaran dimana kebijakan atau kebiasaan dimana pemegang kendaraan dinas menalangi biaya pajak terlebih dahulu sebelum dilakukan penggantian (SPJ). Hal ini menyebabkan keengganan atau keterbatasan finansial pemegang kendaraan untuk membayarpajak tepat waktu. 2. Terdapat 4 unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat yang telah dikembalikan, sehingga secara otomatis tidak dapat dilakukan pembayaran pajaknya.				Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66,67	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	1 Unit Kendaraan Dinas operasional roda 4 Sudah tidak dapat dioperasikan lagi (rusak beraat dan anggarannya hanya tersedia untuk 2 unit kendaraan dinas operasional (baik Pemeliharaan maupun pembayaran pajaknya).				Tidak Mencapai Target
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126,67	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN					Mencapai Target
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Akses Keuangan Daerah	0.00	BUPATI					

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tepat	22,29	KADIS		Tidak Mencapai Target			
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	100,00	KABID ADPEMDES			Mencapai Target		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	100,00	JF				Mencapai Target	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan, seluruhnya kewajiban kepala desa terhadap penyampaian administrasi penyelenggaraan pemerintahan telah terpenuhi.				Mencapai Target
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	161,29	JF	pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa seharusnya Target Kinerja Renstra hanya 1 dokumen dan Target Kinerja Renja seharusnya 157 desa.				Mencapai Target
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan, seluruhnya kewajiban kepala desa terhadap penyampaian laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes disampaikan sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam Kemendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup nomor 94 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.				Mencapai Target

	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan terkait dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa karena telah idlakukan fasilitasi terhadap proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa merah putih				Mencapai Target
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100,00	Kabid PUEKD	Berdasarkan dokumen laporan yang disampaikan oleh masing-masing BumDesa telah dilakukan pemeringkatan dengan kategori sebagai berikut : Perintis (98), Pemula (51), Berkembang (6), Maju (5).				Mencapai Target
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100,00	JF	tidak ada permasalahan terhadap sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				Mencapai Target
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	400,00	Kabid Penataan Desa	mencapai kesepakatan - Ada Desa dan Kecamatan yang belum ditemukan Perda Pembentukannya - Sulitnya mencapai kesepakatan batas antar Desa				Mencapai Target
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100,00	JF	0				Mencapai Target
	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan desa yang melaksanakan	100,00	Kabid PUEKD			Mencapai Target		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama	100,00	JF				Mencapai Target	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	100,00	Kabid PUEKD	Masih Kurangnya koordinasi Desa dalam melibatkan instansi terkait (DPMD) dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar Desa.				Mencapai Target

	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	100,00	Kabid PUEKD	Belum Semua Desa Menyerahkan Dokumen Perjanjian Kerjasama				Mencapai Target
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100,00	Kabid PUEKD	sejak penyegaran pengurus yang kedua, bumdesma pkp jasa prima tidak berjalan dengan baik				Mencapai Target
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Infrastruktural	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa	100	KADIS		Mencapai Target			
	PENATAAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	200,00	Kabid Penatan Desa			Mencapai Target		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa	425,00	Kabid Penatan Desa				Mencapai Target	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	650,00	Kabid Penatan Desa	perubahan nama dusun menyesuaikan dengan dokumen kependudukan dan peraturan Bupati Sumbawa tentang nama Dusun				Mencapai Target
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	200,00	Kabid Penatan Desa	penataan kewenangan Desa dan menyusun Perdes Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa				Mencapai Target

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Pengeluaran perkapita yang di sesuaikan	0.00	BUPATI					
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal	Rata - Rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	86,65	KADIS		Tidak Mencapai Target			
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	100,00	KABID KELDES DAN SOSBUDMASY			Mencapai Target		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan	100,00	JF				Mencapai Target	

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	742,86		dan Sosial Budaya Masyarakat telah melebihi target jumlah dokumen. Per Juli 2025 tercatat capaian kinerja sebanyak 52 dokumen. Jumlah tersebut meliputi penataan kelembagaan Tim Pembina Posyandu, Kepengurusan Posyandu, dan PKK. Meski demikian, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kinerja (evaluasi/perbaikan tahun anggaran selanjutnya) yaitu: 1. Pembinaan untuk penataan kelembagaan belum menyeluruh ke kelembagaan yang lain seperti Karang Taruna, Masyarakat Hukum Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, RT, RW dan LPM. Sejauh ini pembinaan masih terfokus pada kelembagaan Posyandu. 2. telah diajukan surat Bupati Sumbawa tentang Permohonan nomor register Posyandu Tahap I hasil penataan kelembagaan LKD/LKK khususnya Posyandu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, sebanyak 367 lembaga posyandu terdiri atas 296 SK Kepengurusan dan kader Posyandu yang berkedudukan di Desa dan 71 SK Kepengurusan dan kader Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan dengan dokumen				Mencapai Target
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	100,00	Kabid PUEKD	Masih Banyak BumDesa yang tidak berjalan sehingga tidak dapat memberikan kontribusi kepada PADesa				Mencapai Target

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	66,67	Kabid PUEKD	Masih kurang nya koordinasi posyantek kecamatan dengan Desa dalam menjaring penemu TTG				Mencapai Target
--	--	--	-------	-------------	--	--	--	--	-----------------

TABEL EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PADA DPMD KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025

PD	Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Renstra tahun n (Rp)	Target Kinerja DPPA tahun n	Alokasi Anggaran DPPA tahun n (Rp)	Realisasi Kinerja tahun n	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran	PK/ SKP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	42.000.000,00	79,61	45.508.000,00	64,50	44.308.000,00	0.00	97,36	BUPATI
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	42.000.000,00	sedang	45.508.000,00	rendah	44.308.000,00	0.00	97,36	KADIS
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Poin)	42.000.000,00	72,50	45.508.000,00	64,50	44.308.000,00	0.00	97,36	SEKDIS
	Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas	42.000.000,00	3	45.508.000,00	3	44.308.000,00	100,00	97,36	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.000.000,00	3	45.508.000,00	3	44.308.000,00	100,00	97,36	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Pelayanan Publik	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0.00	0.00	BUPATI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat	0,00	Baik	0,00	Baik	0,00	0.00	0.00	KADIS
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0.00	0.00	KABID ADPEMDES
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.938.543.128,00	3.427	4.131.906.139,00		3.982.179.491,00	0,00	96,38	BUPATI
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD	3.938.543.128,00	A	4.131.906.139,00	A	3.982.179.491,00	0.00	96,38	KADIS
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP PD	3.938.543.128,00	80,32	4.131.906.139,00	80,40	3.982.179.491,00	0.00	96,38	SEKDIS
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	20.621.200,00	9	36.092.400,00	14	35.859.240,00	155,56	99,35	KASUBBAG P&P
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12.986.500,00	2	24.238.500,00	2	24.144.340,00	100,00	99,61	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1.123.400,00	1	1.123.400,00	1	1.117.400,00	100,00	99,47	Kasubbag P&P

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.336.400,00	1	1.336.400,00	1	1.328.400,00	100,00	99,40	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	662.000,00	1	662.000,00	1	656.000,00	100,00	99,09	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.016.300,00	1	3.658.500,00	6	3.629.500,00	600,00	99,21	Kasubbag P&P
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.890.000,00	1	1.890.000,00	1	1.879.000,00	100,00	99,42	Kasubbag P&P
	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.606.600,00	2	3.183.600,00	2	3.104.600,00	100,00	97,52	Kasubbag P&P
	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	3.617.003.528,00	5	3.696.189.439,00	5	3.608.864.864,00	100,00	97,64	Sekdis
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.551.927.328,00	35	3.631.113.239,00	35	3.545.378.464,00	100,00	97,64	Sekdis

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.510.000,00	1	60.510.000,00	1	59.631.000,00	100,00	98,55	Sekdis
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.622.650,00	1	1.622.650,00	1	1.349.850,00	100,00	83,19	Sekdis
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1.443.550,00	1	1.443.550,00	1	1.213.550,00	100,00	84,07	Sekdis
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.292.000,00	100,00	86,13	Sekdis
	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	165.907.500,00	4	264.613.400,00	4	217.426.730,00	100,00	82,17	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.310.000,00	1	1.310.000,00	1	1.166.000,00	100,00	89,01	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	128.684.500,00	10	197.247.400,00	14	152.399.000,00	140,00	77,26	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.288.000,00	12	6.288.000,00	12	5.597.000,00	100,00	89,01	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.625.000,00	12	59.768.000,00	12	58.264.730,00	100,00	97,48	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	46.448.000,00	3	46.448.000,00	3	39.093.200,00	100,00	84,17	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.635.000,00	12	1.635.000,00	12	1.594.000,00	100,00	97,49	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40.200.000,00	12	40.200.000,00	12	33.466.200,00	100,00	83,25	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.613.000,00	12	4.613.000,00	12	4.033.000,00	100,00	87,43	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	88.562.900,00	3	88.562.900,00	3	80.935.457,00	100	91,39	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.600.000,00	15	3.600.000,00	5	1.337.227,00	33,33	37,15	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72.172.900,00	3	72.172.900,00	2	67.683.230,00	66,67	93,78	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.790.000,00	15	12.790.000,00	19	11.915.000,00	126,67	93,16	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Akses Keuangan Daerah	3.514.046.782,00					0.00	0.00	BUPATI
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tepat	3.514.046.782,00	100	3.862.674.018,00	22,29	3.647.396.318,00	22,29	94,43	KADIS
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	3.505.625.032,00	100	3.862.674.018,00	100	3.647.396.318,00	100,00	94,43	KABID ADPEMDES
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	3.505.625.032,00	157,00	3.862.674.018,00	157	3.647.396.318,00	100,00	94,43	JF
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16.085.000,00	5	16.085.000,00	5	14.837.000,00	100,00	92,24	JF

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk	54.565.500,00	31	241.451.500,00	50	51.074.500,00	161,29	21,15	JF
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	2.487.543.582	2	2.630.508.368,00	2	2.626.232.368,00	100,00	99,84	JF
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	13.608.000,00	1	42.608.000,00	1	42.186.840,00	100,00	99,01	JF
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	695.802.000	157	751.346.200	157	746.715.200	100,00	99,38	Kabid PUEKD
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	40.033.500,00	1	38.243.500	1	29.841.500	100,00	78,03	JF
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas	113.965.950,00	4	92.435.950	16	87.120.290	400	94,25	Kabid Penataan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	84.021.500,00	157	49.995.500	157	49.388.620	100	98,79	JF
	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan desa yang melaksanakan	8.421.750,00	64,33	7.371.750,00	64,33	4.491.750,00	100	60,93	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama	8.421.750,00	7	7.371.750,00	7	4.491.750,00	100	60,93	JF

	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	3.487.250,00	1	3.137.250,00	1	1.361.250,00	100	43,39	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	1.711.250,00	1	1.361.250,00	1	1.361.250,00	100	100,00	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3.223.250,00	1	2.873.250,00	1	1.769.250,00	100	61,58	Kabid PUEKD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Infrastrukt	26.318.000,00		26.318.000,00		24.775.000,00	0.00	94,14	BUPATI
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa	26.318.000,00	14971,05	26.318.000,00	14971,05	24.775.000,00	100	94,14	KADIS
	PENATAAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	26.318.000,00	8,28	26.318.000,00	16,56	24.775.000,00	200,00	94,14	Kabid Penatan Desa
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa	26.318.000,00	4	26.318.000,00	17	24.775.000,00	425,00	94,14	Kabid Penatan Desa
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13.860.000,00	2	13.860.000,00	13	12.761.000,00	650,00	92,07	Kabid Penatan Desa
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	12.458.000,00	2	12.458.000,00	4	12.014.000,00	200,00	96,44	Kabid Penatan Desa

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan	Pengeluaran perkapita yang di sesuaikan	39.582.500,00				92.757.100,00	0.00	0.00	BUPATI
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal	Rata - Rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	39.582.500	133.106.651	98.807.700,00	115.340.213	92.757.100,00	86,65	93,88	KADIS
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	39.582.500,00	12,68	98.807.700,00	12,68	92.757.100,00	100,00	93,88	KABID KELDES DAN SOSBUDMASY
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan	39.582.500,00	7	98.807.700,00	7	92.757.100,00	100,00	93,88	KABID KELDES DAN SOSBUDMASY

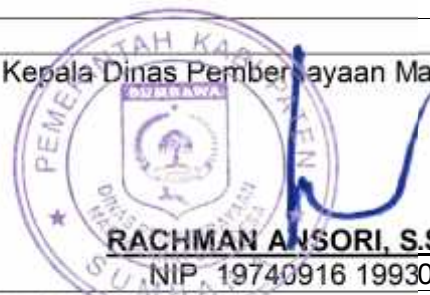
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27.845.000,00	7	87.410.200,00	52	83.103.600,00	742,86	95,07	KABID KELDES DAN SOSBUDMASY
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	3.325.250,00	7	2.985.250,00	7,00	1.361.250,00	100,00	45,60	Kabid PUEKD
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8.412.250,00	3	8.412.250,00	2	8.292.250,00	66,67	98,57	Kabid PUEKD



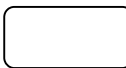
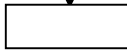
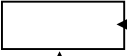
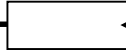
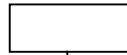
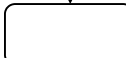
**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  <u>RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE</u> NIP. 19740916 199302 1 001
	Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Pelaksana Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif, Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1	
Keterkaitan SOP Administrasi Persuratan Lintas Unit Kerja dan Lintas Unit Organisasi (Eselon II)	Peralatan/Perlengkapan 1. Dokumen Perencanaan 2. Format Pelaporan 3. Komputer/Laptop 4. Printer 5. ATK	
Peringatan 1. Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2. Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Pencatatan dan Pendataan 1. Nomor Surat 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Program	

SOP Pengumpulan Data Kinerja

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala OPD	Sekretaris	Kabid	Kasi	Ksb. Perenc.	Staf Pengolah data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian perintah tentang pengumpulan data kinerja perangkat daerah							Surat	5 Menit	Tanda terima surat	
2	Penyusunan Form Daftar Kebutuhan Data Kinerja OPD							IKU, PK	60 Menit	Dokumen Daftar Data AKIP	
3	Penyampaian surat permintaan data Kinerja kepada unit kerja lingkup OPD							Lembar Disposisi	10 Menit	Tanda terima surat	
4	Pengisian data Kinerja dan penyampaian laporan							Dokumen Daftar Data AKIP	5 hari	Isian Data AKIP	
5	Verifikasi data kinerja dalam Daftar Kebutuhan Data Kinerja							Isian Data AKIP	2 hari	verifikasi Isian Data AKIP	
6	Kompilasi Data Kinerja							verifikasi Isian Data AKIP	5 hari	Kompilasi Data AKIP	
7	Validasi Data Kinerja							Kompilasi Data AKIP	3 Hari	Data Kinerja	
8	Penyusunan laporan Data kinerja							Data Kinerja	2 Hari	Laporan	
9	Penyampaian laporan Data kinerja (Bulanan, triwulan, semester, tahunan)							Laporan Data kinerja	30 menit	Tanda terima	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Bungur Nomor 3 Sumbawa Besar 84316
Telepon (0371) 625004 – Fax (0371) 21503
laman : dpmd.sumbawakab.go.id

Sumbawa Besar, 30 Maret 2026

Nomor : 000.8.6.3/ 97 /DPMD/2026
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Gabung
Hal : **Matriks Tindak Lanjut AKIP
Tahun 2025**

Yth. Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Di,-
Sumbawa Besar

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor: 700.1.2.1/116/AKIP/ltkab/2025 Tanggal 1 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dengan ini kami sampaikan Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Sumbawa



RACHMAN ANSORI, S.Sos.,M.SE
NIP. 197409161993021001

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Menetapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Melalui Perkada sebagai bentuk Legalitas Dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017	Membuat Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja (Renja) DPMD Tahun 2026.	Tahun 2025	12 Bulan	Kepala Dinas PMD	Sudah membuat Peraturan Kepala Daerah ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 153 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026.
2	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar diupayakan menggunakan teknologi informasi berupa (Aplikasi Monev) sehingga pengumpulan dan pengukuran data kinerja dapat terintegrasi.	Membuat Laporan Kinerja mingguan yang selanjutnya di rekap Pertriwulan Menggunakan <i>exel Spreadsheet</i> ; Setiap bidang membuat laporan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran mingguan dan di eksport oleh kepala Dinas melalui pertanggungjawaban 3W (What, Who, Wheen) kepada Bupati sumbawa baik via luring maupun daring.	Tahun 2025	12 Bulan	Kepala Dinas PMD	telah dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran 2025
3	Dokumen laporan kinerja agar dapat disusun secara berkala	Membuat laporan kinerja triwulan sebagaimana penjabaran dalam point	Tahun 2025	12 Bulan	Kepala Dinas PMD	Sudah dilakukan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres penyelesaian
	(pertriwulan) dengan mencantumkan Progres dan rekomendasi triwulan berikutnya serta capaian persentase masing-masing porsentase masing-masing pertriwulan	2 di atas dan dokumen laporan kinerja sudah dilampirkan dalam Dokumen LKJIP 2026 atas pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025				
4	Rekomendasi AKIP Tahun sebelumnya (2024) atas Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran TA. 2023 yaitu Laporan Kinerja agar menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Laporan Kinerja sudah menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dengan menyiapkan data dukung dan laporan kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat, juga dari level pimpinan sampai kinerja individu untuk selanjutnya dibuat/disajikan efesiensi atas penggunaan Sumber daya yang ada.	Tahun 2025	12 Bulan	Kepala Dinas PMD	Sudah dilakukan terlampir dalam dokumen LKjIP 2026 atas pelaksanaan Kinerja dan Anggaran TA. 2025.
5	Rekomendasi AKIP Tahun sebelumnya (2024) atas Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran TA. 2023 yaitu Rencana Aksi yang disusun masih berorientasi pada	Dalam pelaksanaan dan penjabarannya menggunakan metode pemakaian rumus dalam laporan rencana aksi jika realisasi kinerja tidak sesuai realisasi anggaran maka hasil rumus error, untuk menjawab rekomendasi ini maka metode penggunaan	Tahun 2025	12 Bulan	Kepala Dinas PMD	Sampai dengan diterbitkan TLHE ini pengerjaan Dokumen Realisasi Rencana Aksi Dalam proses penyesuaian sesuai rekomendasi;

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres penyelesaian
	penyerapan anggaran yang di bagi pada tiap indikator kinerja dan Program Pertriwulan, sehingga detail terkait upaya sejauh ini masih menggunakan realisasi anggaran.	rumus harus dirubah agar penyajian rincian rencana aksi sesuai breakdown kinerja sebenarnya.				

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumbawa



RACHMAN ANSORI, S.Sos.,M.SE
NIP. 197409161993021001